



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

PPAS - APBD

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	1
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
1.3. Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
Bab II Rencana Penerimaan Daerah.....	7
2.1 Target Pendapatan Daerah.....	8
2.2 Rencana Penerimaan Daerah.....	9
Bab III Prioritas Belanja Daerah.....	14
Bab IV Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	28
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	28
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	30
Bab V Rencana Pembiayaan Daerah.....	36
Bab VI Penutup.....	38



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

APBD TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan Prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan Prioritas dan Program Nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Lombok Tengah ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/kegiatan;
2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3 Dasar Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib administrasi Pengajuan, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Target Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 mengacu dan sesuai dengan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023*. Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi Tahun

2021 sebesar Rp2.109.739.782.960,12, target Tahun 2022 sebesar Rp2.282.408.069.286 sedangkan proyeksi pada Tahun 2023 sebesar Rp2.275.608.069.286,00.

2.2 Rencana Penerimaan Daerah

Berikut dijabarkan komposisi Rencana Penerimaan Daerah yaitu dari Pendapatan Daerah tahun 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 dengan mempertimbangkan target tahun 2022.

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp163.077.512.900,58 dan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp315.849.210.525,00, sedangkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sama dengan target Tahun 2022 sebesar Rp315.849.210.525,00.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan berangsur-angsur membaik dari akibat pandemi Covid-19 akibat rebound effect atas upaya pemulihan ekonomi Daerah dan Nasional, sedangkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa telah dilakukan penyesuaian berdasarkan informasi Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya terdiri dari: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah*

2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.802.016.562.853,00, pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1.924.286.896.507,00, dan pada Tahun 2023 diproyeksikan sama dengan target Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.924.286.896.507,00. Pendapatan

transfer terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah

2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp144.645.707.206,54, dan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp42.271.962.254,00, sedangkan Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp35.471.962.254,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari: Pendapatan Hibah yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dan Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD

Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya dan potensi daerah. Dalam prioritas skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah program dan kegiatan OPD yang ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Tema pembangunan dalam RKPD tahun 2023 adalah: ***“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”*** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik
- 2) Produk UMKM berkualitas
- 3) Desa wisata bertaraf internasional
- 4) Integrasi pelayanan publik
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan

- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya

Adapun sinergi antara ketujuh prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam program-program pembangunan yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Pemilihan program pembangunan didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran 3.1, 3.2, dan 3.3

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Unsur pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang Pemerintahan, Unsur Pengawasan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan serta Unsur Pemerintahan Umum.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Belanja daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang, Unsur Pendukung, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga Daerah (SSHD) Regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, (f) Sosial. Untuk Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Bidang (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olah Raga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan (q) Perpustakaan dan (r) Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Bidang: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Perdagangan, (e) Perindustrian dan (f) Transmigrasi. Unsur Penunjang meliputi Bidang : (a) Sekretariat Daerah dan (b) Sekretariat DPRD. Unsur Pendukung meliputi (a) Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian, (d) Pendidikan dan Pelatihan, dan (e) Penelitian dan Pengembangan. Unsur Pengawasan : Inspektorat, Unsur Kewilayahan : Kecamatan dan Unsur Pemerintahan Umum : Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya. Pada Tahun Anggaran 2023 ini alokasi penggunaan dana melalui Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah disusun akan diprioritaskan dalam Upaya mencapai 6 prioritas pembangunan serta dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada Penguatan Layanan Kesehatan, Pemulihan ekonomi dan penguatan perlindungan sosial.

Sedangkan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dirinci sebagaimana tertuang dalam lampiran 4.1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Untuk Tahun 2023 Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.670.018.498.085,00. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

2) Belanja Modal

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap dan lainnya. Secara keseluruhan Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.830.683.001,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Untuk tahun 2023 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp382.758.888.200,00. Belanja transfer meliputi : Belanja Bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Selengkapnya Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan) sebagaimana tertuang dalam lampiran 4.2.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Untuk rencana penerimaan pembiayaan dianggarkan sejumlah Rp0,00. Dari sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar **Rp45.000.000.000,00** atas Pinjaman Daerah pada PT. SMI yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Modern Jelajok dan Infrastruktur Jalan. Adapun pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran 5.1

BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Program atau kegiatan yang perlu diakomodir dalam Nota Kesepakatan, berdasarkan kesepakatan bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Praya, 15 Agustus 2022
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI



KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

K U A

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023



1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.

KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. RKPD Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dokumen RKPD, KUA dan PPAS disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedudukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai bagian kerangka dasar perencanaan jangka pendek/tahunan yang terkait dengan sasaran dan kebijakan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta (f) strategi pencapaian yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis jangka menengah dengan ketersediaan anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk dijadikan pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta dijadikan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- s. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48);
- t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
- w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.



2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada arah kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang telah disusun secara teknokratis dengan pendekatan kajian internal dan eksternal daerah dengan berpedoman pula pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan pencapaian kinerja perekonomian daerah tahun 2021. Untuk menjamin keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan RKP dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Tujuan dari internalitas dan eksternalitas ini adalah agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan, serta menjaga kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2021 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut :

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 17,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 1,02 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 16,67 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika termasuk beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 11,57 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 12,04 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah pada tahun 2021 mampu tumbuh positif sebesar 4,03 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2016-2021 (juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2016	14.423.751,17	10.854.980,04
2017	15.789.214,15	11.551.693,67
2018	16.702.136,71	11.916.532,02
2019	17.853.805,79	12.400.273,33
2020*	16.670.395,40	11.571.990,69
2021**	17.689.609,49	12.037.664,55

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 dalam RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori
Tahun 2016-2021
(persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,86	6,37	2,24	1,55	-0,42	1,01
B Pertambangan dan Penggalian	9,36	7,12	6,53	9,36	1,08	6,64
C Industri Pengolahan	3,19	4,69	1,55	3,6	-3,05	0,20
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,85	5,39	1,14	9,59	9,72	8,23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,72	3,95	0,32	-0,43	-1,78	1,43
F Konstruksi	8,68	7,03	5,49	3,04	8,68	16,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	7,93	5,73	6,33	-5,57	2,69
H Transportasi dan Pergudangan	5,74	6,23	-1	-5,6	-45,02	-5,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,54	7,01	1,86	1,78	-20,43	2,24
J Informasi dan Komunikasi	8,62	8,02	5,34	4,24	12,92	5,02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	11,11	10,48	6,87	1,49	14,2	6,48
L Real Estat	6,54	6,81	4,94	4,98	1,42	1,52
M,N Jasa Perusahaan	6,72	5,34	5,08	5,16	-2,87	0,41
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,31	2,56	0,76	3,43	2,96	2,64
P Jasa Pendidikan	6,01	5,62	5,53	6,96	1,6	1,46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,78	6,02	7,54	6,18	0,72	8,01
R,S,T,U Jasa lainnya	6,25	6,81	5,06	5,36	-5,41	2,26
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,07	-6,68	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2021 (persen)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,76	1,66	0,58	0,43	(0,001)	0,27
B Pertambangan dan Penggalian	0,39	0,31	0,21	0,57	0,001	0,35
C Industri Pengolahan	0,19	0,26	0,08	0,20	(0,002)	0,01
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00	0,00	0,01	0,000	0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,00	0,00	(0,000)	0,00
F Konstruksi	1,07	0,90	0,62	1,95	0,004	2,70
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,87	0,62	0,72	(0,006)	0,32
H Transportasi dan Pergudangan	0,99	1,06	(0,02)	(0,92)	(0,067)	(0,49)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,08	0,02	0,03	(0,002)	0,02
J Informasi dan Komunikasi	0,15	0,14	0,09	0,08	0,002	0,11
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,21	0,21	0,14	0,03	0,003	0,17
L Real Estat	0,22	0,23	0,17	0,17	0,001	0,06
M,N Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	(0,000)	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,12	0,13	0,09	0,17	0,001	0,14
P Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,23	0,32	0,001	0,07
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,14	0,15	0,20	0,17	0,000	0,23
R,S,T,U Jasa lainnya	0,14	0,16	0,12	0,13	(0,001)	0,05
PDRB	5,65	6,42	3,17	4,01	(6,68)	4,03

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber : RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

Pada tabel 2.3 di atas dapat dilihat sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Lombok Tengah di tahun 2021 sektor pertanian telah kembali memberikan sumber pertumbuhan yang positif sebesar 0,27% dan sumber pertumbuhan terbesar adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 2,70%. Sementara itu sektor industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum juga telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun relatif kecil yaitu masing-masing sebesar 0,01% dan 0,02% yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

2) Pendapatan Perkapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun dan biasanya juga digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran penduduk. Data ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2021 dari Rp. 11.772.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 13.087.000 pada tahun 2019. Namun di tahun 2020, Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp. 12.112.000. Pada tahun 2021, pendapatan perkapita masih mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di tahun 2021 sebesar 1,43%. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2021

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15.642.000	11.772.000
2017	16.952.000	12.412.000
2018	17.779.000	12.685.000
2019	18.843.000	13.087.000
2020*	17.448.000	12.112.000
2021**	16.851.000	11.467.000

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 dalam RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

3) Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2021 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2016	145.370	15,80
2017	142.142	15,31
2018	130.002	13,87
2019	128.822	13,63
2020	128.100	13,44
2021	131.940	13,44

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2022 dalam RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

b. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional yang sangat dipengaruhi adanya perkembangan penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui program pemulihan ekonomi telah membawa dampak pada pertumbuhan positif di tahun 2022 sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan menggali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2023. Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,17 – 5,12%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 12,31 – 12,72%
3. Gini ratio pada kisaran 0,339 – 0,335

4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,11 – 2,06%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 67,17 poin.

c. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi regional daerah yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai peluang yang harus diraih dengan aksi nyata. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- a. Konsumsi masyarakat diperkirakan terus tumbuh sebagai cerminan pola hidup normal baru pasca pandemi mengingat terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah peralihan dari masa pandemik ke endemik.
- b. Sektor konstruksi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, dan hal ini diperkirakan masih akan berlangsung dengan adanya proyek pembangunan di kawasan KEK Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan investasi pembangunan infrastruktur lainnya.
- c. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2023 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping peluang-peluang tersebut, di tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan.
- b. Penguatan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja.

- c. Mendorong adanya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.
- d. Perlunya penguatan investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal, dan reformasi regulasi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada umumnya arah utama kebijakan pengembangan keuangan daerah adalah peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah, yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Namun demikian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sepenuhnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat meskipun pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, fluktuasi harga komoditas andalan, dan kondisi daerah yang cukup aman. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja daerah masih tertata dengan baik dan untuk tahun-tahun ke depan diupayakan akan semakin baik.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah pada Tahun 2023 diarahkan dalam rangka mengoptimalkan kembali target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada dengan mempertimbangkan pula perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional terutama

dampak pandemi Covid-19 disertai strategi dalam upaya pencapaiannya dan merencanakan penganggaran pendapatan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2023.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD tahun kedua dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2023 adalah pengalokasian anggaran pada pengeluaran pembiayaan yang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok utang atas Pinjaman Daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur.



ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Dinamika perekonomian global dan domestik berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. Merebaknya Pandemi Covid-19 yang muncul di tahun 2020 menjadi tantangan besar. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen. Proses pemulihan dan *turning point* aktivitas ekonomi nasional menuju zona positif pada akhir tahun 2020 terutama didorong oleh peran APBN menjalankan fungsi *countercyclical* dalam menangani pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketangguhan ekonomi Indonesia juga terlihat dari ekonomi yang mampu kembali ke level pra-pandemi di 2021 dengan tumbuh positif 3,7 persen. Kebijakan penanganan yang tepat dan adopsi “*new normal*” di masa pandemi ditandai dengan meningkatnya penggunaan transaksi uang elektronik telah mendorong aktivitas konsumsi masyarakat yang sebelumnya tertahan. Level ekspor telah kembali ke level pra-pandemi didukung laju pemulihan ekonomi global dan ekspor hasil hilirisasi mineral logam, yang potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan. Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu,

reformasi struktural juga terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak *scarring effect* dari pandemi.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Di tengah periode transformasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru diperkirakan akan semakin kuat baik untuk kelompok masyarakat menengah maupun berpendapatan rendah. Dorongan Pemerintah melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga

akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dalam tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif di tengah upaya konsolidasi fiskal. Alokasi belanja yang sebelumnya difokuskan untuk penanganan pandemi dan stabilisasi perekonomian dapat direalokasikan menjadi belanja yang lebih berkualitas serta memiliki produktivitas tinggi. Belanja tersebut juga diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* yang tinggi bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. Pertumbuhan PKP dalam tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6 – 1,2 persen.

Akselerasi transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan investasi di 2023. Aktivitas pembangunan diperkirakan masih akan menjadi motor utama kinerja investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, revitalisasi industri, dan penyelesaian pembangunan PSN, termasuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. Program penerapan ekonomi hijau juga akan menambah sumber investasi baru, terutama pada industri-industri pendukung teknologi ramah lingkungan. Langkah reformasi struktural yang konsisten, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan pengembangan kawasan industri, dan peningkatan kemudahan berusaha juga turut menyokong daya tarik ekonomi nasional sebagai destinasi investasi utama di dunia. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 – 6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang *robust*. Permintaan akan produk unggulan nasional diproyeksikan masih tetap kuat, meskipun di tengah moderasi

pertumbuhan ekonomi global. Transformasi ekonomi dalam mendorong nilai tambah produk-produk sektor unggulan diharapkan dapat mendorong daya saing dan pangsa pasar produk nasional di dunia. Promosi global untuk mewujudkan ekonomi hijau juga akan menstimulus pertumbuhan ekspor-ekspor produk terkait, seperti hasil hilirisasi mineral dan kendaraan bermotor beremisi rendah. Di sisi lain, dengan berevolusinya pandemi menjadi endemi, tingkat kedatangan turis asing yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan jasa nasional. Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik yang semakin kuat mendorong tingginya permintaan bahan baku dan barang modal yang bersumber dari impor. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 – 8,0 persen dan 6,6 – 7,8 persen.

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Performa kedua sektor ini diperkirakan menguat seiring dengan solidnya permintaan dalam negeri maupun penguatan daya saing produk dalam negeri pada pasar global. Upaya revitalisasi industri diharapkan dapat efektif dalam mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dorongan kepada penyerapan produk manufaktur yang memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi juga dilakukan, salah satunya melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023. Perbaikan kondisi ekonomi Indonesia serta kualitas infrastruktur yang

signifikan akan menstimulus geliat pembangunan. Pemanfaatan Kawasan Industri existing maupun baru sebagai destinasi ekspansi usaha berperan penting dalam inisiasi proyek-proyek konstruksi sektor swasta.

Sementara pemulihan kinerja BUMN sebagai agen pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah dan didukung oleh Indonesia Investment Authority (INA) akan berperan dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas dan PSN Pemerintah. Sementara itu, keberlanjutan program-program padat karya melalui K/L teknis serta pemerintah daerah akan turut mendorong proyek konstruksi berskala menengah-kecil di daerah. Mempertimbangkan potensi tersebut, sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan didorong oleh hilirisasi dan meningkatnya daya saing produk olahan tambang nasional. Sektor ini diperkirakan mencatat tumbuh positif pada kisaran 3,2 – 3,5 persen di tahun 2023. Proses hilirisasi logam mineral seperti bauksit, timah, tembaga, dan nikel yang dimulai sejak 2015 akan mampu menjaga kinerja sektor pertambangan. Selain hilirisasi, perkembangan sektor pertambangan juga akan didorong oleh meningkatnya permintaan akan logam mineral yang terkait dengan energi baru dan terbarukan seperti nikel. Permintaan akan logam mineral ini terutama yang terkait dengan industri baterai akan didorong oleh upaya pencapaian target operasionalisasi mobil listrik secara bertahap dalam jangka menengah.

Efektivitas upaya penanganan pandemi menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kembali rasa kepercayaan pada sektor pariwisata. Transisi pandemi menjadi endemi merupakan momentum bagi pariwisata nasional untuk bangkit dengan kuat. Langkah pengendalian pandemi yang selama ini memberikan hasil positif juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan destinasi pariwisata yang sangat layak untuk dikunjungi kembali, terutama oleh turis mancanegara. Selain itu,

dukungan Pemerintah selama masa pandemi melalui program PEN kepada sektor pariwisata juga berperan penting dalam memberikan bantalan sekaligus mempersiapkan sektor ini dalam menyerap potensi kenaikan aktivitas pariwisata dalam jangka menengah. The International Air Transport Association (IATA) memperkirakan bahwa angka perjalanan internasional akan tumbuh signifikan pada tahun 2023, dan akhirnya berpotensi melampaui level pra-pandemi pada tahun 2024. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

Mempertimbangkan potensi tersebut, perekonomian nasional di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat dengan tetap mewaspadaai risiko eksternal yang masih tinggi. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural diharapkan dapat terus menopang perekonomian berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas makroekonomi yang terjaga dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi politik yang terjaga secara kondusif terutama dalam menghadapi perhelatan pemilihan umum tahun 2024 juga sangat krusial dalam melanjutkan agenda reformasi struktural dalam mewujudkan perekonomian yang lebih berdaya saing dan produktif.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan

untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang tren kunci utama berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan di jangka pendek-menengah. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perubahan peta investasi dan perdagangan dunia yang terjadi akibat dari pandemi serta dinamika geopolitik menjadi kesempatan emas bagi perekonomian nasional untuk menarik investasi di sektor-sektor potensial serta mendorong partisipasi sektor manufaktur domestik dalam *Global Value Chain*, termasuk untuk industri mesin, elektronik, alat komunikasi, serta hilirisasi mineral.

Sementara itu, dorongan komunitas global dalam mewujudkan ekonomi hijau juga semakin mengemuka. Indonesia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat besar berpotensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara signifikan. Selain itu, inisiatif Pemerintah untuk mulai menerapkan pola perdagangan emisi, salah satunya melalui pengenaan pajak karbon, menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan ekonomi hijau.

Arah pertumbuhan investasi kepada sektor energi terbarukan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung teknologi energi terbarukan.

b. Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2023 tetap berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$

persen, masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan *administered price* juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum.

Secara jangka menengah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam tren menurun dan stabil sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai target, Pemerintah menetapkan sasaran inflasi dengan tren menurun ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang stabil dan rendah. Meskipun ditetapkan menurun, laju inflasi diperkirakan tetap dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang tanpa memberikan tekanan yang besar pada sisi permintaan. Pencapaian tren tingkat inflasi tersebut tetap harus didukung oleh terobosan dalam mengatasi isu struktural pangan serta pengelolaan inflasi *administered price* yang hati-hati yang juga masih

menjadi tantangan hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemerintah dan BI akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan koordinasi guna pelaksanaan bauran kebijakan yang mendukung penciptaan laju inflasi jangka menengah yang rendah dan stabil pada rentang sasaran inflasi pada 2024 – 2026.

c. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh negara maju maupun berkembang masih akan mewarnai dinamika di pasar keuangan global. Potensi risiko utamanya akan terjadi pada periode kenaikan suku bunga acuan oleh *The Fed* yang diperkirakan masih berlanjut di tahun 2023 sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah. Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara *emerging markets*, termasuk Indonesia.

Dalam jangka menengah, pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik maupun dinamika di pasar keuangan global. Berbagai tantangan dan risiko yang berasal dari eksternal, seperti prospek pertumbuhan ekonomi global yang moderat dan belum merata serta risiko geopolitik, diperkirakan akan menyebabkan sentimen terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah. Selain itu, perekonomian domestik yang akan terus membaik berimplikasi pada tingginya kegiatan importasi sehingga akan memengaruhi tingkat permintaan valas di dalam negeri. Kebutuhan valas juga diperkirakan berasal dari kenaikan pembayaran bunga utang luar negeri khususnya sebagai dampak peningkatan pembiayaan selama pandemi Covid-19.

Meski demikian, fundamental perekonomian domestik yang didukung dengan transformasi ekonomi dan reformasi struktural secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi kunci utama dalam menarik kepercayaan investor. Penguatan kinerja ekspor melalui upaya peningkatan produksi yang bernilai tambah diharapkan dapat menopang pasokan valas di pasar domestik yang lebih sustain. Dari sisi kebijakan Pemerintah, strategi dalam menyusun kebijakan fiskal yang responsif dalam menghadapi tantangan ke depan, salah satunya melalui strategi pembiayaan yang *prudent*, juga diharapkan dapat menjaga persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Koordinasi antara otoritas terkait di sektor keuangan dalam wadah KSSK juga penting dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memonitor kondisi pasar keuangan domestik dan mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya penguatan program pendalaman pasar keuangan dan pelaksanaan reformasi struktural di sektor keuangan juga diharapkan dapat menopang sistem keuangan domestik yang lebih kondusif. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dengan moneter juga terus diarahkan untuk dapat merespons berbagai tantangan dari global, namun dengan tetap mengutamakan dukungan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian dan inflasi dalam level yang rendah. Pada akhirnya, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik dan dapat menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah masih adanya risiko global. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.300 – 14.800 per USD dan relatif stabil dalam jangka menengah di tahun 2024 sampai 2026.

d. Suku Bunga SUN 10 tahun

Dalam jangka menengah, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diperkirakan masih berfluktuasi seiring masih tingginya

ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya kebijakan normalisasi moneter negara maju untuk mengatasi tekanan inflasi yang terus meningkat sejalan dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Sejumlah bank sentral negara maju, terutama The Fed diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan setidaknya hingga akhir 2023. Selain itu, risiko geopolitik juga turut memberi tekanan pada volatilitas pasar keuangan global.

Dari sisi domestik, berlanjutnya tren pemulihan yang ditopang oleh stabilitas makro ekonomi akan mendukung kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Berbagai upaya reformasi struktural, termasuk penguatan peran sektor keuangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada surat utang Pemerintah. Konsolidasi fiskal yang akan dimulai di 2023 serta dukungan strategi pembiayaan yang *prudent* juga diperkirakan dapat menjaga kinerja tingkat suku bunga SUN 10 tahun.

Berdasarkan dinamika tersebut, tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2023 diperkirakan berada pada kisaran 7,34 – 9,16 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Potensi penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan masih dapat terjadi seiring perbaikan fundamental perekonomian domestik, meskipun dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian global.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia

Setelah mengalami gejolak, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) diperkirakan melandai pada 2023. Secara fundamental,

harga minyak mentah dunia diperkirakan mengalami penurunan dipengaruhi oleh permintaan yang tetap tumbuh positif di tengah terus membaiknya sisi produksi. Tren positif sisi permintaan didorong oleh aktivitas industri dan mobilitas global yang meningkat seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, sisi produksi semakin membaik didorong oleh semakin kondusifnya dunia usaha migas tercermin dari semakin meningkatnya aktivitas rig-rig minyak baik di negara OPEC+ maupun non-OPEC+, terutama Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak global sehingga menjadi faktor yang mendorong harga minyak melandai. Meskipun diperkirakan mengalami penurunan, sisi non fundamental masih dapat membayangi pergerakan harga minyak mentah seiring risiko geopolitik yang berkepanjangan sehingga memunculkan sentimen negatif. Ketidakpastian tersebut mendorong pergerakan harga minyak dapat berfluktuasi dan masih diliputi oleh ketidakpastian. Mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah tersebut, ICP juga diperkirakan bergerak melandai pada 2023 mengikuti tren harga minyak utama dunia. Perkiraan ICP pada 2023 bergerak pada kisaran USD80 - 100/barel.

Perkembangan harga minyak dalam jangka menengah akan dipengaruhi faktor fundamental, yaitu sisi permintaan dan penawaran, serta geopolitik. Sisi fundamental diperkirakan dipengaruhi oleh gerakan transisi energi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun begitu, permintaan bahan bakar fosil akan tetap berfluktuasi seiring transisi energi yang membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Aktivitas ekonomi global yang semakin membaik seiring pemulihan pasca pandemi Covid-19 masih akan mendorong kenaikan permintaan diiringi oleh perbaikan sisi produksi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan energi alternatif dan semakin canggihnya teknologi eksplorasi, harga ICP diperkirakan akan termoderasi dalam jangka menengah.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi.

Pemanfaatan teknologi produksi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan plan of development dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan lifting. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 619 – 680 ribu barel per hari (bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

Daya tarik investasi migas khususnya dalam kegiatan eksplorasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan cadangan migas yang signifikan guna mencapai tujuan jangka panjang sektor hulu migas. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membuat iklim investasi industri hulu migas yang lebih atraktif, dengan berbagai kemudahan perizinan serta pemberian insentif. Masih terdapat beberapa area yang menjadi ranah kebijakan fiskal dan memerlukan pembicaraan lebih lanjut antar stakeholders, antara lain pembagian (*gross split*) Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS, signature bonus, *participating interest*, dan pengenaan pajak. Sementara itu, untuk mengatasi masalah regulasi dan birokrasi,

Pemerintah mengupayakan penyederhanaan perizinan dan pembentukan *task force* percepatan eksplorasi. Pemerintah juga berperan memberikan jaminan stabilitas politik dan keamanan seperti dukungan pengamanan fasilitas operasi migas. Berdasarkan kinerja *lifting existing*, potensi-potensi peningkatan yang ada, serta upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu migas termasuk perbaikan iklim investasi, produksi dan *lifting* migas dalam jangka menengah diperkirakan meningkat.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,4 - 6,3	5,5 - 6,5	5,5 - 6,5
Inflasi (%)	2,0 - 4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800	14.200 - 14.800
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 - 9,16	6,24 - 7,90	6,25 - 8,10	6,27 - 8,29
Harga Minyak Mentah/ICP (USD/barel)	80 - 100	70 - 90	70 - 90	70 - 90
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (Ribu bph)	619 - 680	644 - 723	682 - 786	695 - 835
<i>Lifting</i> Gas Bumi (Ribu bsmph)	1.019 - 1.107	1.051 - 1.155	1.131 - 1.289	1.230 - 1.428

Sumber: Kemenkeu, 2022

Tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, serta beberapa risiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Untuk itu, tema yang diusung dalam Kerangka

Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai **Visi Indonesia Maju 2045**. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah. Transformasi ekonomi tersebut meliputi antara lain digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian baik global maupun nasional. Penguatan kinerja perekonomian nasional di tahun 2022 yang ditunjang dengan upaya penguatan investasi, ekspor dan kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung pula adanya upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara masif, serta reformasi struktural yang terus diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif dalam memperkuat fondasi perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional serta adanya transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian nasional tersebut, diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah.

Kendatipun kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah di berbagai sektor mengalami penurunan sebagai akibat dari terjadinya

Pandemi COVID-19 yang mulai nampak di tahun 2020, namun beberapa sektor seperti konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi mampu bertahan dan tumbuh pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah terus digalakkan oleh Pemerintah melalui beragam program pemulihan ekonomi dan upaya tersebut telah menampakkan hasil dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021 sebesar 4,03%. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan didorong menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di 2023 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Penguatan stabilitas kondisi kamtibmas dan layanan investasi yang mudah dan cepat untuk mendukung keberlangsungan proyek pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pembangunan infrastruktur pendukung sirkuit dan berbagai investasi pembangunan infrastruktur lainnya. Akselerasi proses digitalisasi ekonomi dan layanan publik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan sangat dibutuhkan di era normal baru. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi khususnya terhadap tenaga kerja dan angkatan kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja termasuk fokus pada upaya transfer teknologi dalam hilirisasi industri pada skala mikro, kecil maupun menengah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 mengacu

dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam RKPd tahun 2023 adalah: **“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik;
- 2) Produk UMKM berkualitas;
- 3) Desa wisata bertaraf internasional;
- 4) Integrasi pelayanan publik;
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan;
- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar;
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut, sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan dan proyeksi perekonomian daerah tahun 2023, maka asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
(1)	(2)	(3)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,17 - 5,12
2	Tingkat kemiskinan (%)	12,31 – 12,72
3	Gini ratio	0,339 – 0,335
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,11 – 2,06
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	67,17

Sumber : RKPД Kab. Lombok Tengah Tahun 2023



Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat dipacu, digali dan dapat dikendalikan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Meningkatnya kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan target dan capaian Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan

daerah serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Strategi, arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi pendapatan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Ekstensifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah khususnya perkembangan hotel baru, baik yang dibangun di dalam maupun di luar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing policy*). Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu

melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan.

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Penganggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-SDA Mineral dan Batubara-Royalty, DBH-SDA Kehutanan-Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) dan DBH-SDA Perikanan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 masing-masing obyek pendapatan secara umum diproyeksikan sama dengan besaran yang dianggarkan Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sama dengan besaran target pada APBD Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Penganggaran pendapatan DAK Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sama dengan alokasi DAK Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sama dengan besaran target pada APBD Tahun Anggaran 2022.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sementara didasarkan pada besaran pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan bantuan

keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diasumsikan sama dengan besaran target pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkoordinasi dan turut berkontribusi serta tetap menjaga jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya peningkatan capaian penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga perolehan pendapatan transfer khususnya bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tercapai secara optimal.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari

pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Penganggaran pendapatan hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari sumbangan pihak ketiga dengan rincian dan besaran sama dengan Tahun Anggaran 2022.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang diharapkan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2023 serta mempertimbangkan pula peluang transisi pandemi Covid-19 di Indonesia tahun 2022 menjadi endemi pada tahun 2023 maka target penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.275.608.069.286.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.315.849.210.525 atau sama dengan besaran target Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022. Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2023 tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp.200.369.470.598, Retribusi Daerah sebesar Rp.32.689.670.777, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.579.190.491 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.74.210.878.659.

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.924.286.896.507 atau sama dengan besaran target Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2022. Target Pendapatan Transfer tersebut bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.816.938.435.000 atau sama dengan besaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

a) Dana Perimbangan

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.605.251.135.000, meliputi:

- (1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.87.790.010.000.
- (2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum sebesar Rp.939.405.513.000,00.

(3) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.230.778.743.000.

(4) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp.347.276.869.000,00.

b) Dana Insentif Daerah

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.9.347.274.000,00.

c) Dana Desa

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.202.340.026.000,00.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.107.348.461.507.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.35.471.962.254, meliputi :

- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp.302.000.000 bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga.
- 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.35.169.962.254 yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

Adapun realisasi anggaran dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020–2023

Kode	Uraian	APBD 2020 (Realisasi)	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Anggaran)	KUA 2023 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.096.751.245.984,90	2.109.739.782.960,12	2.282.408.069.286	2.275.608.069.286
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.419.405.625,90	163.077.512.900,58	315.849.210.525	315.849.210.525
4 1 1	Pajak Daerah	55.498.799.502,42	66.526.039.370,55	190.144.753.248	200.369.470.598
4 1 2	Retribusi Daerah	16.255.651.949,34	16.682.948.506,17	34.368.888.421	32.689.670.777
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.339.359.321,62	8.409.991.406,79	11.507.005.000	8.579.190.491
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	124.325.594.852,52	71.458.533.617,07	79.828.563.856	74.210.878.659
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.776.714.951.375,00	1.802.016.562.853,00	1.924.286.896.507	1.924.286.896.507
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.696.620.231.432,00	1.717.529.205.274,00	1.816.938.435.000	1.816.938.435.000
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.094.719.943,00	84.487.357.579,00	107.348.461.507	107.348.461.507
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.616.888.984,00	144.645.707.206,54	42.271.962.254	35.471.962.254
4 3 1	Pendapatan Hibah	5.769.588.984,00	10.266.815.063,00	7.102.000.000	302.000.000
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	107.847.300.000,00	134.378.892.143,54	35.169.962.254	35.169.962.254

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 (diolah)



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas

daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum.

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Dalam rangka menjaga konsistensi dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, kebijakan belanja daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu dan berpedoman pada kebijakan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD tahun kedua dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan teknis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme APBD menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Kondisi tersebut berakibat pada perencanaan penganggaran terutama pada sisi Belanja Daerah yang harus terukur baik kinerja maupun jumlah kebutuhannya.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Strategi, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah :

- 1) Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan ASN (PNS dan PPPK), gaji/tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta gaji/tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk pemenuhan beban belanja bunga atas pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur.

- 2) Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi NTB dalam kerangka otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mendukung percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
- 4) Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.
- 5) Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pengalokasian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menitikberatkan pada pemenuhan belanja urusan pemerintah daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) dan pengalokasian belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat diarahkan penggunaannya (*earmarking*), mengutamakan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta telah diselaraskan pula dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Besarnya anggaran belanja daerah akan disesuaikan dengan besarnya perkiraan perolehan anggaran pendapatan daerah yang direncanakan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.2.230.608.069.286 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.670.018.498.085 meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.017.675.644.835.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan pegawai dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan pegawai dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah terkait. Belanja Barang dan Jasa yang direncanakan pada Tahun

Anggaran 2023 sebesar Rp.585.833.003.454.

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.12.639.461.500 yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.44.193.588.296, meliputi: Belanja hibah dalam rangka pengalokasian DAK Non Fisik Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi PAUD swasta dan Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi PKBM, belanja hibah kepada MUI, BAZNAS, PMI, KONI, KNPI, KTI, Pramuka dan beberapa organisasi yang berbentuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya

yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbadan hukum Indonesia serta Belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan bantuan sosial dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.9.676.800.000 yang bersumber dari rencana penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang diprioritaskan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang tidak menerima bantuan sejenis.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Modal yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.172.830.683.001 dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan

serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah

dan/atau masyarakat.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.000.000.000, diarahkan untuk penyediaan kebutuhan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut juga disiapkan untuk penyediaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diarahkan untuk pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN Non Kuota). Hal tersebut, mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.382.758.888.200 terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.23.305.914.140, terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp. 20.036.947.060 dan belanja bagi hasil retribusi daerah

sebesar Rp. 3.268.967.080.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp. 359.452.974.060 meliputi :

- a) Belanja bantuan keuangan umum-Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.126.026.948.060;
- b) Belanja bantuan keuangan umum-Dana Desa, sebesar Rp.202.340.026.000;
- c) Belanja bantuan keuangan khusus-Trantib, sebesar Rp. 3.891.600.000;
- d) Belanja bantuan keuangan khusus-Pengurus Rumah Ibadah, sebesar Rp. 3.314.400.000,00; dan
- e) Belanja bantuan keuangan khusus-Pengadaan kendaraan operasional Kepala Dusun sebesar Rp. 23.880.000.000.

Adapun realisasi dan anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020–2023

Kode	Uraian	APBD 2020 (Realisasi)	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Anggaran)	KUA 2023 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	2.093.636.570.402,34	2.118.548.957.565,49	2.466.845.277.286	2.230.608.069.286
5 1	BELANJA OPERASI	1.423.641.520.448,25	1.550.644.602.114,46	1.687.055.668.972	1.670.018.498.085
5 1 1	Belanja Pegawai	821.708.778.149,00	961.563.087.787,00	1.040.279.533.602	1.017.675.644.835
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	355.709.216.838,10	538.861.687.227,46	574.553.952.837	585.833.003.454
5 1 3	Belanja Bunga	4.608.264.725,00	3.362.781.099,00	13.767.062.477	12.639.461.500
5 1 5	Belanja Hibah	239.873.015.424,15	45.657.046.001,00	45.441.588.296	44.193.588.296
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	1.642.245.312,00	1.200.000.000,00	13.013.531.760	9.676.800.000
5 2	BELANJA MODAL	282.545.185.043,79	225.852.588.845,75	386.633.044.767	172.830.683.001
5 2 1	Belanja Modal Tanah	4.581.679.709,00	5.667.176.416,00	0	0
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.580.102.643,00	96.690.576.518,00	80.087.059.585	26.036.895.353
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.908.742.885,79	91.549.373.291,75	44.751.912.182	81.554.436.806
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.015.713.500,00	26.729.597.000,00	261.454.073.000	64.893.775.500
5 2 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.946.486,00	5.215.865.620,00	340.000.000	345.575.342
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	62.707.900.977,00	6.932.998.714,00	23.132.225.319	5.000.000.000
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	62.707.900.977,00	6.932.998.714,00	23.132.225.319	5.000.000.000
5 4	BELANJA TRANSFER	324.841.963.933,30	335.118.767.891,28	370.024.338.228	382.758.888.200
5 4 1	Belanja Bagi Hasil	6.416.522.803,00	7.354.939.566,00	22.451.364.168	23.305.914.140
5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan	318.425.441.130,30	327.763.828.325,28	347.572.974.060	359.452.974.060
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.114.675.582,56	(8.809.174.605,37)	(184.437.208.000)	45.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 (diolah)



Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA Tahun Anggaran 2022) akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.45.000.000.000,00 yang direncanakan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pasar Modern Jelajok serta pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan selisih antara rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.0 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.45.000.000.000 maka terdapat pembiayaan netto sebesar (Rp.45.000.000.000).

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai surplus yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 yang merupakan selisih positif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar Rp.45.000.000.000 dan pembiayaan netto sebesar (Rp.45.000.000.000) sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur APBD dalam posisi berimbang.

Adapun realisasi dan anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Realisasi dan Anggaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020–2023

Kode	Uraian	APBD 2020 (Realisasi)	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Anggaran)	KUA 2023 (Anggaran)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.114.675.582,56	(8.809.174.605)	(184.437.208.000)	45.000.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	74.434.051.439,30	57.703.719.489,36	204.437.208.000	0
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.943.602.769,30	57.680.419.489,36	4.437.208.000	0
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.424.998.670,00	0	200.000.000.000	0
6 1 6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	65..450.000,00	23.300.000,00	0	0
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	20.000.000.000	45.000.000.000
6 2 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	20.000.000.000	45.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	54.532.798.191,30	37.802.466.241,36	184.437.208.000	(45.000.000.000)
6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	57.647.473.773,86	28.993.291.635,99	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

VIII

STRATEGI PENCAPAIAN

Keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan tentunya tidak terlepas dari dukungan fiskal yang memadai. Kapasitas fiskal di daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah untuk mampu membiayai pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan.

Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan perimbangan keuangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan program dan kegiatan utama

pengelolaan pendapatan daerah yang dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:

- a. perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- b. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- c. pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- d. penagihan pajak daerah;
- e. penyelesaian keberatan pajak daerah; serta
- f. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas potensi yang ada dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhitungkan pula sumber-sumber obyek Pendapatan Asli Daerah yang belum tergali secara optimal serta melihat perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang kian membaik sehingga upaya pencapaian realisasi atas target yang telah ditentukan tidak mengalami kesulitan dan dapat terwujud.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan (*mandatory spending*), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

Perencanaan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan mekanisme yang berlaku jika informasi resmi terkait dengan alokasi dana transfer ke daerah telah dipublikasikan atau Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer ke daerah telah ditetapkan. Perencanaan target pendapatan transfer ke daerah dengan dasar hukum yang jelas akan memberikan harapan perolehan pencapaian target secara optimal.



Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Praya, 15 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

ttd

H. LALU PATHUL BAHRI

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA	4 dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD	3 dokumen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4750 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Sarana Prasarana Milik Daerah yang di kelola Dinas Pendidikan	1 Laporan	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PERDA atau PERBUP tentang pendidikan	2 dokumen	1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kab. Lombok Tengah	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan kinerja pelayanan administrasi umum OPD terlaksana	4 laporan	1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyedia jasa listrik, air, dan internet, jasa penyediaan peralatan kantor	2 laporan	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana utilitas kantor	4 laporan	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD APK SD APK SMP/MTs PAUD Terakreditasi Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs SD Terakreditasi A	70.07 Poin 105.51 Poin 105.17 % 39.10 % 98.96 % 19.60 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	105.51 %	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		SMP Terakreditasi A	16.20 %								
						1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	66 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	105 Peserta Didik		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	97 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	616 Satuan Pendidikan		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1412 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	616 Satuan Pendidikan		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	616 Satuan Pendidikan		Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10 Orang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs	105.17 %	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	11 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	21 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		Kab. Lombok Tengah	
						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit		Kab. Lombok Tengah	

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sedang/Berat	Sub Kegiatan		Kab/Lokasi	Sub Kegiatan	Ket.	
		Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Target Capaian				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan							Target Capaian
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sub Kegiatan Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima Didik	80 Peserta	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Didik	8770 Peserta	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	397 Orang	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	196 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	196 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10 Orang	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.02.45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kab. Lombok Tengah			
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	70.07 %		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit	Kab. Lombok Tengah			
							1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Kab. Lombok Tengah			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	50 Paket	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17940 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1018 Orang	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	934 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	10 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	98.96 %	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	11775 Peserta Didik	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	86 Satuan Pendidikan	Kab. Lombok Tengah		
						1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	Kab. Lombok Tengah		
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal 50 % Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal 25 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	50 Persen	1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	660 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	25 Persen	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi 94.63 % Persentase PTK SD tersertifikasi 77.96 % Persentase PTK SMP tersertifikasi 77.68 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK Paud, SD, dan SMP Bersertifikasi Pendidik	4558 Orang	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	26 Ijin	1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Penerbitan Izin Pendirian Sekolah Baru	17 lembaga	1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan izin pendirian sekolah baru	9 lembaga	1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa penganta	100 % 100 %	1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	100 Persen	1.01.06.2.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Publikasi	Kab. Lombok Tengah	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan OPD Dokumen perencanaan SKPD Laporan kinerja SKPD	1 Th 5 Dokumen 4 Dokumen	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan OPD Laporan keuangan SKPD	1 Tahun 1 Tahun 12 bln 16 Dokumen	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430 Orang/bulan 1075 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				
No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Lokasi	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Sub Kegiatan
						1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan		
			1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu penyelesaian angka kredit PNS fungsional sesuai periode 1 Th		1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan operasional pendukung pelayanan OPD 12 bln Komputer dan perlengkapannya. 8 Unit Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi 5 Dokumen		1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan jasa penunjang OPD 12 bln		1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan operasional OPD	12 bln		1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Dukungan operasional BLUD Rumah Sakit Terpenuhinya Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	1 Tahun 10 pusk		1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja 5 Unit Kerja	Kab. Lombok Tengah	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Indeks Kepuasan Layanan Rujukan Persentase Balita Stunting	9.20 % 125 10.000 KH 81.00 % 25.29 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Alat kedokteran umum dan klinik jantung Cakupan keterpenuhan ASPAK	102 Unit 100 %	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit		
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	28 Unit		
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Unit		
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit		Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	96 Unit			
						1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	15 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket			
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket			
						1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan kesehatan	100 %	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	581 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	689 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	698 Orang			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	739 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	740 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	750 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	815 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	820 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	831 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	863 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	880 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	882 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	899 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	907 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	922 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	979 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	998 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1015 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1191 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1582 Orang		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20006 Orang		
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20680 Orang		
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18187 Orang		
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90348 Orang		

No	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Target Capaian			
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan						Target Capaian
					1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15012 Orang				
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63194 Orang				
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 450 Orang 10460 Orang		Kab. Lombok Tengah		
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45877 Orang		Kab. Lombok Tengah		
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10017 Orang		Kab. Lombok Tengah		
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.598 Orang 5 Orang 12 Orang 16 Orang 34 Orang 48 Orang 76 Orang 86 Orang 87 Orang		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	91 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	93 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	95 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	98 Orang		
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16.746 Orang	Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	49 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	53 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	55 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	63 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Pelayanan Sesuai Standar				
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	84 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	112 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	146 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	147 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	149 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	175 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	220 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	429 Orang			
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1825 Orang			
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	56337 Orang			
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20 Dokumen			
						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen			
						1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen			
						1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	15 Dokumen			
						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen			
						1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen			
						1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen		
						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		
						1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29 Unit		
						1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	33 Unit		
						1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga 10 Keluarga 68 Keluarga 89 Keluarga 100 Keluarga	Kab. Lombok Tengah	
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan penerapan sistem informasi kesehatan	29 Pusk	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4 Dokumen		
						1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Cakupan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan	100 %	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit		

No	Program	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Ket.
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes yang Hasil Program Target Capaian 100 %	1.02.03.2.02.02.02 Kegiatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase tenaga yang Kelayakan Kegiatan Kredit Target Capaian 100 %	1.02.03.2.02.02.02.02 Sub Kegiatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar Target Capaian 2 Orang	Kab. Lombok Tengah	
	dasar	Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Fungsional sesuai periode	Standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 89 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 116 Orang		
		1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi 100 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang	Kab. Lombok Tengah	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang diterbitkan 85.00 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin 100 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 Dokumen		
		1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan industri rumah tangga yang memiliki sertifikat SPP-IRT 100 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100 Dokumen		
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan posyandu keluarga aktif 80 %	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan implemtasi PHBS 100 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 8 Dokumen		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD B Predikat	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya laporan Keuangan SKPD	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi SKPD	100 %	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersediannya Penunjang Urusan SKPD	100 %	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Terpeliharannya Kendaran Dinas Operasional dan Alat Berat	80 %	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	29 Unit		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	81.81 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi	998 Ha	1.03.02.2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	16 Unit		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	81.92 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat (SR) terlayani dan mengkonsumsi Air Bersih	1967 SR	1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	10800 SR		
							1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah masyarakat terlayani Air Bersih	750 KK		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Sanitasi Layak dan Aaman	100 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan air limbah domesti	2 Unit	1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	200 Rumah Tangga		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah Terbangun	3 Unit	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Gedung Pemerintah Terbangun	3 unit	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		
							1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	2 Unit		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	luas bangunan dan lingkungan yang tertata	15,000 m2	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	luas bangunan yang di pelihara	15000 m2	1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap	79.88 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan mantap Kabupaten	647.01 Km	1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	38.89 KM		
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	218 KM		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	65 M		
							1.03.10.2.01.24 Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	0 KM		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kinerja Program dan Anggaran OPD	100 Persen	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan PD	0 Persen	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	100 Persen	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	100 Persen	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100 Persen	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pengelolaan/pemeliharaan Perumahan (Rumah Susun Umum, Rumah Khusus dan Perumahan Komersil)	3 Unit	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	1 Dokumen	1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		
		Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	3.5 %	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan/Pemeliharaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	3 unit	1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	10 Ha	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	1 Dokumen	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	10 Ha	1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	10 Ha		
					Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	10 Ha	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	500 Unit		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	5.48 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU yang terbangun di kawasan permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, PJU Permukiman, RTH)	100 Persen	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	200 Lokasi		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	0 Persen 100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan 77 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 % 100 Persen	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi data aset OPD	100 0	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 Persen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	60 Persen	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit 9 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit 15 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Lombok Tengah		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda yang ditegakkan	60 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 288 Kasus Angka Penyakit masyarakat 45 Kasus Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum 1980 orang	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	130 Kasus	Kab. Lombok Tengah		
						1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Kasus	Kab. Lombok Tengah		
						1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada 100 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
						1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana	19,42 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 30 Persen	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	250 Orang			

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Kegiatan Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Dindikorwina Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kabupaten/Kota	Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Kegiatan	Indikator Kinerja					Sub Kegiatan	
						Keluaran Kegiatan						Target Capaian
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Persen	1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
							1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4 Unit			
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan	200 Rumah/KK			
							1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	450 Orang			
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	15 Menit	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100 Persen	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen			
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit			
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	30 Persen	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang			
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase IKU OPD yan tercapai	100 %	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	8 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.		

DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Lombok Tengah			
No	Program	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Kab/Kota Kab.	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Kegiatan 5 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab.		
						Jumlah Pegawai yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah		
					1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD 13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 buah	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
					1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum 12 Kali	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
					1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan Laporan Hasil Rakor dan Konsultasi 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintahan Daerah 12 Bulan	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Internet, Layanan Air dan Layanan Listrik 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
					1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik 90 %	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit STNK Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui 20 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
					1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah yang diservice 7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang dibina 61.64 %	1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Tersosialisasi UGB/PUB 100 %	1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin 30 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina 61.64 %		1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 48 Lembaga		Kab. Lombok Tengah	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 70.43 %		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2460 Orang		1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 648 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun 35 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 1750 Orang		Kab. Lombok Tengah	
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar dan Pengaduan 0.63 %		1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan 50 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan		Lokasi	Ket.
						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah fakir miskin dan 530 orang anak terlantar yang Target Capaian	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang dirasilitasi Data dan yang Target Capaian 412870 KPM	1.06.05.2.02.02 Sub Kegiatan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Target Capaian 190000 Keluarga	Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	
		tertangani	Daerah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Bantuan Sosial					
					1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	92000 Keluarga 130370 Keluarga	Kab. Lombok Tengah	
					1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Lombok Tengah	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya 100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan 100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	Kab. Lombok Tengah	
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga yang memenuhi Standar Kompetensi 100 %	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Kab. Lombok Tengah	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola 1 TMPNK	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak 100 %	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Kab. Lombok Tengah	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD B Predikat	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 112 Dokumen	2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	27 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	112 Laporan	2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintah Daerah	12 bulan	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	44 Unit	2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen database ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Databasse Ketenagakerjaan	1 Dokumen	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	100 Perusahaan	Kab. Lombok Tengah	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	90 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Memenuhi Standar Kompetensi	506 orang	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	488 Orang	Kab. Lombok Tengah	
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS Terakreditasi	21 Lembaga	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	86 Lembaga	Kab. Lombok Tengah	
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPKS Yang Beroperasi	5 lembaga	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	10 Perizinan	Kab. Lombok Tengah	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lulusan Bersertifikasi	16 orang	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja terdaftar terserap	95 %	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI Ynag difasilitasi	2650 CPMI/PMI	2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1000 Orang	Kab. Lombok Tengah	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang memiliki Peraturan Perusahaan Yang Disahkan	5 %	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial Yang Disahkan	28 Kasus	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	14 Perkara	Kab. Lombok Tengah	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Sakip OPD	B Predikat	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.	

DAERAH	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lombok Tengah			
KABUPATEN/KOTA				Lokasi			
No	Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Ket.		
	Hasil Program	Target Capaian	Keluaran Kegiatan	Target Capaian			
				2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan Kab. Lombok Tengah	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 100 %	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah 100 %	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
					2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Efektifitas layanan organisasi perangkat daerah 100 %	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
					2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik 80 %	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 127 Unit	Semua Kab/Kota Lombok Tengah
					2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	Kab. Lombok Tengah
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif 69,23 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG 100 %	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani 100 %	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen	

No	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja				
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100 %	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	67.13 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase industri rumahan (IR) yang aktif	54.39 %	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Utama Predikat Layak Anak		2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	80 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	26 Organisasi	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak	220 Orang	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan anak yang dilayani	100 %	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase IKU OPD Yang Terpenuhi	23 Dokumen	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	0 Prosen	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100 %	2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan SOP dan tepat waktu	100 %	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 Prosen	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	77 %	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	17 unit	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	4 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	7 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	Kab. Lombok Tengah	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Konsumsi energi	2.558,63 Kkal/Kap/Hari	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Tersedia dan Tersalurnya Pangan Pokok Yang Merata dan cukup	100 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi Protein	76.60 Gram/Kap/Hari	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
						2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	48 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit		Kab. Lombok Tengah	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dokumen, Kelompok Tani, 27 Kelompok Kelompok wanita Tani	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	13 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	6 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rasio Desa Rawan Pangan yang ditangani	0.51 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Data Kerentanan Dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Rentan Rawan Pangan Yang Ditangani	20 Desa	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase akupan layanan pengawasan keamanan pangan (%)	100 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan	Jumlah Komoditi Yang diuji	18 Komoditi	2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan	100 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	3 Lokasi	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase permukiman baru yang terbangun	100 %	2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Penataan Kawasan Permukiman Baru	1 Lokasi	2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dokumen penatagunaan tanah	1 Dokumen	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	7 dokumen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	10 Laporan	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	1 Dokumen	2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	1 Jenis	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	56.45 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data kualitas air dan kualitas udara	1 Dokumen	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
						2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	Semua Kab/Kota		
						2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	12 Dokumen			
							Jumlah peralatan laboratorium yang terkalibrasi	20 unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan taman kehati (ha)	5 Ha	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Laporan terkelolanya KEHATI di Kabupaten	1 Dokumen	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.5 Ha	Semua Kab/Kota	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	5 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan yang terbit	85 izin	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40 Laporan	Semua Kab/Kota	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Tenaga Fungsional yang dilatih	4 orang	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH	3 Laporan	2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Pengaduan Kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas (%)	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditangani	25 Pengaduan	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100 %	Semua Kab/Kota	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	19 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Sampah yang dikelola	200 Ton/Tahun	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan		
		Persentase sampah yang ditangani	31.30 %				2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	300 Ton	Semua Kab/Kota	
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Semua Kab/Kota	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai 100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
								2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD 100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					2.12.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	100 %	2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Penerima Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Layanan Umum Kantor	100 Peresen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP Elektronik 98.54 % Persentase penerbitan KIA 39,92 % Persentase penerbitan surat pindah 100 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	3 Dokumen	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen			
						2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen			
			2.12.02.2.03 Penyelenggaraan	Laporan Hasil	1 Dokumen	2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	1 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pendaftaran Penduduk			Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Porsentase kepemilikan akta kelahiran	97,5 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan pelayanan dan penataan arsip	76 Dokumen	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pencatatan Sipil		1 Dokumen	
							2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya ATK Pelayanan Pencatatan Sipil		1 Paket	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan hasil	100 Dokumen	2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		4 Laporan	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	OPD yang telah melaksanakan kerjasama	10 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		3 Dokumen	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jaringan SIAK	1 Aplikasi	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Laporan	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	3 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen data kependudukan	3 Dokumen	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	112 dokumen	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							2.13.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	25 dokumen	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		29 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	10 dokumen	2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 layanan	2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	51 unit	2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik STNK Roda dua STNK Roda Empat	6 Unit 15 Unit 6 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	78,87 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama	4 desa	2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama	4 Desa	Kab. Lombok Tengah	
						2.13.03.2.01.03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	BBGRM Karya Bakti TNI Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)	127 Desa 6 Desa 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase desa yang tertib administrasi	31,5 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah desa yang tertib administrasi	5 desa	2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	127 Dokumen	Kab. Lombok	

No	PEMERINTAHAN DESA	Program		Penyelenggaraan	Kegiatan		Sub Kegiatan			Tengah	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Administrasi Pemerintahan Desa	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	
		Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	
							2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa	3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Pengisian Data Profil Desa Tepat Waktu	127 Desa	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Penatausahaan Aset Desa	127 Desa	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	115 Orang	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terbentuknya Desa Percontohan Terlaksananya penyusunan laporan kepala desa Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen 127 Desa	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Teridentifikasi Data Tingkat Perkembangan Desa	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga adat desa yang aktif	46,46 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat aktif	75 lembaga	2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	348 Lembaga	Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Temuan	Kab. Lombok Tengah	
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	278 Orang	Kab. Lombok Tengah	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.7 %	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1 Dokumen	2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan		
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS akseptor KB	61.50 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK	218718 Orang	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi		
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	8 Dokumen		
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	8 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	36 Laporan		
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan		
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan		
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PLKB dan Sub PPKBD yang dibina	92.39 %		2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan		
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2040 Orang		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14.99 %		2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	173 Laporan		
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2270 Orang		
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	50 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan			
						2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	15 Laporan			
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peresentase Kampung KB yang aktif	100 %	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12 Kampung KB			
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	65,65 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	65,65 %	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Unit		
						2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan			
						2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98 Kelompok			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang	100 %	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	Semua Kab/Kota	

No	Program	Daerah		diindiklanjuti	Kegiatan		Sub Kegiatan	Kab.	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Kab.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian				Sub Kegiatan
							2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Sub Kegiatan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase validasi data aset OPD	100 %	2.15.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja lebih dari 80%	100 %	2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100 %	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100 %	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	55.96 %	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	9.76 %	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	Kab. Lombok Tengah

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	Kab. Lombok Tengah	
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	72.73 %	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	Kab. Lombok Tengah		
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Jalan Persentase kendaraan yang laik jalan	97 % 97 %	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	Kab. Lombok Tengah		
						2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 paket	Kab. Lombok Tengah		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen lalu lintas yang dilaksanakan	40 %	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	20 dokumen	Kab. Lombok Tengah		
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam berlalu lintas	74 % 74 %	2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 dokumen	Kab. Lombok Tengah		
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum dinormalisasi Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasikan	36 % 36 %	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	Kab. Lombok Tengah		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan PAS kecil Angkutan Laut Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40 % 40 %	2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan laut Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40 % 40 %	2.15.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	10 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	1 Dokumen	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	1 Dokumen	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat	2 Jenis	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	2 Jenis	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	83.63 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPID (OPD, desa, sekolah, puskesmas) yang aktif melaksanakan diseminasi informasi	20 PPID	2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan		
						2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	54 Orang		Kab. Lombok Tengah	
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	85 %	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	1 Aplikasi	2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	Kab. Lombok Tengah	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 Persen	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	1 Dokumen	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Lombok Tengah	
			2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	95 Persen	2.17.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan kantor dengan baik	100 Persen	2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100 Persen	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)	20 Unit	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	30 Unit	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Patuh Perundang-undangan	48 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah koperasi yang patuh perundang-undangan	160 Unit	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
						2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	150 Unit Usaha			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang dilatih	61.22 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih	150 Unit	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang		
				2.17.05.2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peserta pelatihan Pengembangan SDM Usaha Mikro	90 Unit Usaha	2.17.05.2.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Peserta Pelatihan Pengembangan SDM Usaha Mikro	90 Orang		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	0.57 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen penguatan dan kelembagaan koperasi	1 Dokumen	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertubuhan omset aset UMKM	30 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase umkm yang diberdayakan	1 Persen	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	90 Unit Usaha		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	2 Unit	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usaha	10 Unit	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	544 Unit Usaha		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	okumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	10 Dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.	

	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Lombok Tengah			
No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			
					2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.	
								Lombok Tengah	
					2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34 Dokumen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
					2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
					2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
					2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintahan daerah	12 Bulan	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	1 Dokumen	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.18.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMA 1,291,670,000,000 Rp. Nilai investasi PMDN 586,293,000,000 Rp.	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan fasilitas/Insentif Penanaman Modal	2 Dokumen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
						2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	1 Kegiatan Usaha		Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Berusaha di Daerah			
			2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas 1 M	274 Proyek	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Event Promosi	2 Event	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Event	Semua Kab/Kota	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Cakupan Layanan Perizinan Berusaha Kewenangan Kabupaten	100 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3278 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	30 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Wajib Laporm LKPM yang Melapor	36.51 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	2 Dokumen	2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	225 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota	
							2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	Semua Kab/Kota	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Database Sistem Informasi Perizinan Penanaman Modal	1 Database	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Data Digital Investasi	1 Database	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan LKPJ, LPPD, Renja SKPD, RKA/DPA, Renstra	8 dokumen	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LPPD,LKJIP,LKPJ		3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan SKPD	19 dokumen	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lap. Tahunan Keuangan SKPD		1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap. Bulanan/Triwulan dan Semester Keuangan SKPD		12 dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	STNK kendaraan	12 STNK	2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peralatan dan perlengkapan kantor	21 unit	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	3 unit	2.19.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa	19 orang	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung bangunan yang telah direhab	1 unit	2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Kab. Lombok Tengah	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda berprestasi	5 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang dibina	7 %	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	6 Orang	Kab. Lombok Tengah	
						2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	150 Orang		Kab. Lombok Tengah	
						2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	100 Orang		Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				
						2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	30 Orang		Kab. Lombok Tengah	
			2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	5 %	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	49 orang	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlit Usia Pelajar / Jenjang Pendidikan berprestasi	20 orang	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit	Kab. Lombok Tengah	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah kabupaten	2 even	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet berprestasi	22 orang	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	64 Orang	Kab. Lombok Tengah	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Event Olahraga Rekreasi	3 Event	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Anggota Pramuka yang dilatih	40 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang dilatih	400 orang	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Kab. Lombok Tengah	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	58 Instansi	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Buku saku statistik, Buku lomba tengah dalam data, Buku kecamatan dalam data	3 Dokumen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	58 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase informasi daerah yang diamankan	100 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan persandian (OPD)	32 OPD	2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	32 Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2 Orang	Kab. Lombok Tengah	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	38 Event	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	15 Kesenian	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	Kab. Lombok Tengah			
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	100 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina	8 Kelompok	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	Kab. Lombok Tengah			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs yang dilestarikan	10 Buah	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs yang di lestarikan	10 situs	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	Kab. Lombok Tengah			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD tercatat	3 unit	2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Lombok Tengah		
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan pemerintahan daerah	12 bulan	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi baik	1 jenis	2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan kunjungan perpustakaan	80 %	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	Kab. Lombok Tengah		
						2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Kab. Lombok Tengah		
						2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	Kab. Lombok Tengah		
						2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	27500 Eksemplar	Kab. Lombok Tengah		
						2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan	1 Eksemplar	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan		Sub-Kegiatan	Sub-Kegiatan	Sub-Kegiatan	Lokasi	Ket.	
	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			
Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub-Kegiatan	Keluaran Sub-Kegiatan	Target Capaian	Sub-Kegiatan	
			2.23.02.2.02.01 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peserta Lomba yang berkaitan dengan literasi	150 orang	2.23.02.2.02.01 Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Keagamaan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	8 Lokus	Kab. Lombok Tengah	
						2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	Kab. Lombok Tengah	
						2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	2 Orang	Kab. Lombok Tengah	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	3 Naskah	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	3 Naskah	2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3 Eksemplar	Kab. Lombok Tengah	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan pengelolaan kearsipan	80 %	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang di klasifikasikan	159683 berkas	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	430 Arsip	Kab. Lombok Tengah	
			2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsiparis yang dilatih	10 orang	2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pesentase arsip Terselamatkan	75 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang di musnahkan	4500 Berkas	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	4500 Arsip	Kab. Lombok Tengah	
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 Izin	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	3 dokumen	2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	3 Arsip	Kab. Lombok Tengah	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	26 Dokumen	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi (Jenis)	10 Jenis	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah		
						3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintah Daerah (Bulan)	12 Bulan		3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD dalam Kondisi Baik (Jenis)	4 Jenis		3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							3.25.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.589,21 Ton/Tahun	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	112 Unit/paket	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas Kelompok KUB 71 kelompok Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan (KUB) Baru 16 Kelompok		3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya 250 Orang		Kab. Lombok Tengah	
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 25 Kelompok		Kab. Lombok Tengah	
							3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 15 Unit Usaha		Kab. Lombok Tengah	
				3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Ikan yang dilelang 740.2 Ton		3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 12 Layanan		Kab. Lombok Tengah	
				3.25.03.2.06 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan ukuran sampai 10 GT yang terdaftar 504 unit		3.25.03.2.06.02 Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 216 Rekomendasi		Kab. Lombok Tengah	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Benih Ikan 8.242.643 Ekor Produksi Perikanan Budidaya 49.235,16 Ton/Tahun		3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia 367 unit		3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit		Kab. Lombok Tengah	
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 278 Unit		Kab. Lombok Tengah	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Garam Rakyat (Ton) 3.542,33 Ton/Tahun Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Ton) 4.675,10 Ton/Tahun		3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Laporan Data Statistik 12 Dokumen		3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 12 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Lomba Masak Ikan Uji LAB Produk Kelautan dan Perikanan	2 Kali 4 Kali	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	Kab. Lombok Tengah	
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	4 Paket	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	Kab. Lombok Tengah	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	7 Dokumen	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	100 %	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	4 Dokumen	3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	20 Jenis	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi Wisata yang dikembangkan	60 %	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	1 Destinasi 1 Destinasi	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	Semua Kab/Kota	
							3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Media promosi online yang aktif	1 Media	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Media promosi yang aktif	10 Media	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi	50 Orang	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	240 Orang	Semua Kab/Kota	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang meningkat kapasitasnya	50 Orang	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	Semua Kab/Kota	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	12 Dokumen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.27.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Lombok Tengah	
						3.27.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Laporan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Unggulan Sapi Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tembakau	21,461.87 Ton/Tahun								
						3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan Peningkatan Populasi Ternak (Sapi) 212 ekor	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	50 ton		Kab. Lombok Tengah	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	50 Poin	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun 55 Unit	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 paket		Kab. Lombok Tengah	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kenaikan Prosentase Peneratapan Biosecurity Budidaya Ternak	34 %	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjualan Ternak Sapi di Pasar Hewan 5250 Ekor/Tahun	3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 24 Kali	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	24 Laporan		Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Tingkat Serangan Penyakit Hewan/Tanaman	25 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian Hama dan penyakit	750 Ha	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	Kab. Lombok Tengah	
							3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2000 Ha	Kab. Lombok Tengah	
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	260 Rekomendasi	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian	260 rekomendasi	3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	50 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	5 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dari Kelas Lanjut ke kelas Madya	2 %	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 BPP	Kab. Lombok Tengah	
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 kelompok tani	Kab. Lombok Tengah	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai omset perdagangan (Rp.)	116.002,22 Rp	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana perdagangan yang dibangun/direhab	2 unit	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/rehab	2 Unit	Kab. Lombok Tengah	
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku perdagangan yang dilatih	75 orang	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaku Perdagangan yang dilatih	75 orang	Kab. Lombok Tengah	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai transaksi pameran	400,000,000.00 Rp.	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even pameran dagang nasional yang diikuti	2 kali	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah even pameran dagang nasional yang diikuti	2 kali	Kab. Lombok Tengah	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pasar tertib ukur	7 Pasar	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTP yang ditera ulang dan diawasi	5942 alat	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5942 Unit	Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan SPBU, SPBE dan BDKT	12 kali	Kab. Lombok Tengah	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja terselesaikan	12 bulan	3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKJIP, LPPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji asn dan honorer terpenuhi Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	12 bulan 12 bulan	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Listrik ,air, Internet dan Honor PTT	12 bulan	3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						3.31.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	100 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK, Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan Daerah)	2 dok	3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang difasilitasi	100 %	3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran Yang Difasilitasi	5 KK	3.32.03.2.01.04 Pemandangan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	3 Kepala Keluarga	Kab. Lombok Tengah	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	17 Dokumen	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan PD (Renstra, RKT, RKT Perubahan, Renja, Renja Perubahan)	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
		Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %		Persentase IKU OPD Yang Tercapai	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
		Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	100 %								
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100 %								
							4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi kinerja PD (LKJIP, LPPD, LKPD)	3 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	2 Dokumen 0 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	1 Dokumen 100 %	4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP 100 % Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu 100 %		4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Air Layanan Internet Layanan Listrik	3050 M3 10 Rekening 224000 Kwh	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 52 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 80 Unit		4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Peralatan mesin lainnya yang diservice	0 Unit 29 Unit 29 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional KDH/WKDH Tepat Waktu 100 %		4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Lombok Tengah		
						4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana 2 Orang/Bulan Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Lombok Tengah	
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati yang terpenuhi.	100 %	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket		Kab. Lombok Tengah	
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Nilai SAKIP Persentase Dokumen Laporan Kinerja Dilaksanakan Tepat Waktu	100 % 100 %	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen TPP Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen 1 Dokumen 55 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen SP - SOP Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Dokumen 3 Laporan 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen LKJ-IP Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen 4 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan keprotokol, Layanan Komunikasi dan Materi Pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokol	Persentase Layanan Keprotokol, Layanan Komunikasi dan Materi Pimpinan (KDH/WKDH) Sesuai Standar	1 Tahun		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Layanan materi/Komunikasi Pimpinan (KDH/WKDH)	1 Tahun		Kab. Lombok Tengah	
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Informasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang Hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang	100 % 100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi urusan penunjang pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Wilayah Laporan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Laporan Money	1 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		dilaksanakan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	65 %									
						4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Laporan Hasil koordinasi dan evaluasi perencanaan ekonomi mikro	1 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah		
						4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Laporan hasil evaluasi koordinasi dalam pembinaan BUD	5 Dokumen 5 Dokumen		Kab. Lombok Tengah		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian pembangunan	100 %	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Kontrak yang teregistrasi Laporan Monitoring Pembangunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Monitoring Pembangunan	8 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Kontrak yang teregistrasi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sistem Monitoring Pembangunan	1 Dokumen 16 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100 %	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Penetapan Penyediaan Barang dan Jasa	135 Paket		Kab. Lombok Tengah	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pegguna SPSE Terlatih dan Aplikasi Pendukung	1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan		Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pemangku Kepentingan PBJ Tenaga Fungsional PBJ Terfasilitasi	1 Dokumen 19 Orang	Kab. Lombok Tengah	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan sumber daya alam	100 %	4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Laporan Pemantauan Peredaran Pupuk Bersubsidi	1 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
4.02 SEKRETARIAT DPRD											
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja OPD	22 Dokumen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	19 Dokumen	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55.12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lombok Tengah	
							4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum OPD	12 Laporan		4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	66 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan data aset OPD	3 Item		4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Lombok Tengah	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan umum kantor	12 Bulan		4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah terpelihara	67 Unit	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Lombok Tengah		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	12 Laporan	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50.12 Orang/Bulan	Kab. Lombok Tengah		
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Kab. Lombok Tengah		
						4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Laporan layanan administrasi DPRD	130 Dokumen	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
						4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	130 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Berita yang dipublikasikan Rasio Perda yang ditetapkan terhadap Ranperda yang dibahas	750 Berita 67.5 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan DPRD yang dibahas Rancangan Peraturan daerah	2 Peraturan DPRD 6 Ranperda	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau	4 Dokumen	Kab. Lombok		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Naskah Akademik yang Difasilitasi		Tengah	
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	5 Dokumen	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Hasil Pengawasan DPRD	6 Dokumen	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen			
						4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas	19 Dokumen	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	510 Dokumen		Kab. Lombok	

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket.	
		Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian
						4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Aspirasi Masyarakat	47 Dokumen	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	46 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	31 Dokumen	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		
							5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab.

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31 Dokumen		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Administrasi BMD	2 Dokumen		5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah	12 Dokumen		5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	2 Jenis	5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Kondisi Baik	2 Jenis	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPDP	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Program Prioritas	2 Dokumen	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPDP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
						5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan		Kab. Lombok Tengah	
						5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPDP)	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Kab. Lokasi Tersebut	Ket.	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian	Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Daerah	3 Dokumen	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Skala Kabupaten/Kota)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	Kab. Lombok Tengah	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembnagunan Daerah	3 Dokumen	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD Bidang Ekonomi	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen perencanaan, dokumen movev dan dokumen harmonisasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
		Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	100 %				5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
		Peresentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	100 %				5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Perekonomian dan SDA	8 Dokumen		5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Kab.	Ket.	
		Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen perencanaan, dokumen monev dan dokumen harmonisasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
5.02 KEUANGAN											
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen 33 Dokumen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD Tertatanya administrasi perkantoran	23 Dokumen 0 % 100 %	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan 127 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan 18 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80%	100 %	5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	9 Laporan 100 %	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan 24 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi data aset OPD	74 %	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Lombok Tengah		
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pemerintahan Daerah Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	12 Bulan 100 %	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab.		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Lombok Tengah	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Kondisi Milik Daerah Kondisi Baik Persentase BMD kondisi baik	12 Dokumen 74 %	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit 13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD Rata-rata Kecepatan Layanan Perbendaharaan	Tepat Waktu Ketepatan 2 Hari Kerja	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah 1 Dokumen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
						5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen Penatausahaan APBD	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase kelengkapan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBD	100 %	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah	100 %	5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
					Persentase penyelesaian kewajiban pemerintah	100 %	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
				5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Validasi data aset	97.5 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kelengkapan dokumen penatausahaan BMD	100 %	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok	

No	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Tengah	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
		Hasil Program			Target Capaian						Keluaran Kegiatan	Target Capaian
						5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			
						5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			
						5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			
						5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi PAD 274,656,988,932 Rp.	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Laporan Realisasi PAD	12 Dokumen	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen				
						5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan				
						5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan				
						5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen				
						5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen				
						5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
5.03 KEPEGAWAIAN												
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD B Predikat	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	8 Dokumen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	12 Dokumen		5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD pada SKPD	1 Dokumen		5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1 Dokumen		5.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	12 Dokumen		5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	Semua Kab/Kota Kab.	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
										Lombok Tengah	
						5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 Bulan	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi baik	2 Jenis	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tepat Waktu	95 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	3 Dokumen	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	35 %				5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Lokasi	Ket.	
	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja				
Program	Hasil Program	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
						5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	
						5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen SK mutasi dan promosi ASN	2 Dokumen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	
						5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen Laporan pengembangan kompetensi ASN	12 Dokumen	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	
						5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	120 Orang	
						5.03.02.2.03.06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	90 Orang	
						5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	12 Orang	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	12 Dokumen	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	
						5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	
						5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	
						5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kesesuaian jabatan 66 % dan kompetensi		5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen Laporan pengembangan kompetensi teknis	1 Dokumen	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	1 Dokumen	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			
							5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 60 Orang			
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Dokumen		5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5 Laporan			
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH											
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 Dokumen	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	100 %	6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	Kab. Lombok Tengah		
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Laporan	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat	4 Jenis	6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Kab. Lombok Tengah		
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BMD Kondisi Baik	2 Jenis	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	35 Unit	Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya		Kab. Lombok Tengah	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan Pada Pemerintah Daerah	95 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peresentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	35 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	241 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	250 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Peresentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti	100 %	6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur	84.23 %	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Level Maturitas Perangkat Dearah	84.2 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32 perangkat daerah	Kab. Lombok Tengah	
							6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	Kab. Lombok Tengah	
7.01 KECAMATAN											
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	B Predikat B Predikat	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kantor Camat Praya Tengah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah K : Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	4 dokumen 4 Dokumen 7 dokumen 7 Dokumen 100 % 23 dokumen	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				okumen Perencanaan, 5 dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja PD Penganggaran dan Evaluasi 21 dokumen kinerja Persentase IKU OPD yang 100 % tercapai							
						7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan 2 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan		
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi keuangan Kantor Camat Praya Tengah	3 dokumen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Semua Kab/Kota	
				Dokumen administrasi keuangan PD	1 dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Lombok Tengah	
				Dokumen administrasi keuangan PD	1 Dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		
				Dokumen administrasi keuangan PD	3 Dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		
				Dokumen administrasi keuangan PD	8 dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		
				Dokumen administrasi keuangan PD	12 Dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		
				Dokumen administrasi keuangan PD	12 Laporan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		
				K : Dokumen administrasi keuangan PD	25 dokumen			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		
				Laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		
				Laporan Keuangan SKPD	30 dokumen						
				Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	3 dokumen						
						7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		
								Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		
			7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi BMD pada SKPD Dokumen administrasi BMD pada SKPD	2 dokumen 4 dokumen		7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	4 dokumen 2 dokumen	7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum jumlah paket komponen listrik/penerangan kantor yang diselesaikan K : Laporan administrasi umum PD K : Laporan administrasi umum PD Laporan Administrasi Umum Laporan administrasi umum PD Laporan administrasi umum PD Laporan administrasi umum PD Laporan administrasi umum PD Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	1 dokumen 1 paket 1 dokumen 15 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 3 dokumen 4 Laporan PD 3 Dokumen 100 %	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket		Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		
						7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Kondisi Baik	1 Unit	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
				BMD tercatat	4 jenis			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		
				BMD Tercatat	2 jenis						
				BMD Tercatat	3 Jenis						
				BMD Tercatat	7 jenis						
				K : BMD Tercatat	13 Jenis						
				KENDARAAN DINAS	3 UNIT						
				pengadaan AC	1 unit						
				Persentase Validasi Data Aset OPD	100 %						
				Tersedianya Kendaraan Dinas	1 unit						
				Validasi data aset OPD	4 jenis						
				Validasi data aset OPD	73 jenis						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit 4 Unit 5 Unit 8 Unit 20 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Lombok Tengah	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Tercatat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat K : Layanan pemerintahan daerah layanan kantor camat Layanan pemerintahan daerah Layanan pemerintahan daerah Layanan pemerintah daerah Layanan pemerintah daerah	1 Dokumen 12 laporan 3 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 Laporan		7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 3 Laporan 12 Laporan 36 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
								Presentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	1 dokumen		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah kondisi baik	14 Unit		7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
				BMD kondisi baik	10 Jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		
				BMD kondisi baik	59 jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		
				BMD Kondisi baik	11 unit			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		
				BMD Kondisi Baik	4 jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		
				BMD Kondisi Baik	4 Jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		
				BMD Kondisi Baik	7 jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		
				BMD Kondisi Baik	10 Jenis			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		
				Dokumen administrasi BMD pada SKPD	1 dokumen			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		
				Dokumen administrasi BMD pada SKPD	1 Dokumen						
				STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	13 unit						
							7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		
						7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Lombok Tengah	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	100 %	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<p>K : Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 1 dokumen</p> <p>Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen</p> <p>Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 dokumen</p> <p>Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen</p> <p>Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 dokumen</p> <p>Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen</p> <p>Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 doumen (Dokumen)Laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)</p> <p>laporan hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan 3 dokumen</p> <p>Laporan Hasil penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan 2 Laporan</p> <p>Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 1 Laporan</p>	<p>7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan</p> <p>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan</p>			Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Laporan penyelesaian bersama kegiatan pemerintahan di kecamatan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan	1 Laporan 4 dokumen						
						7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen 2 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan	2 dokumen	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum Sarana dan prasarana pelayanan umum yang terpelihara (Unit)	1 DOKUMEN 7 Unit	7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen 2 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	aporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat K : Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dokumen) Laporan Hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Laporan hasil penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Laporan Hasil penyelesaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan 12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 1 dokumen Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 2 dokumen Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 2 Dokumen Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (Dokumen) 1 dokumen laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK 1 dokumen						
						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan			Kab. Lombok Tengah	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang disetujui 15 % Persentase usulan masyarakat yang disetujui 15 %%	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa 1 dokumen Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa 1 Dokumen Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa 2 Dokumen Dokumen perencanaan dan hasil Pemberdayaan Desa 2 Dokumen Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa (Dokume 1 dokumen K : Dokumen perencanaan dan hasil pemberdayaan desa (Dokumen) 1 dokumen Laporan hasil Koordinasi pemberdayaan desa 2 Laporan laporan hasil pemberdayaan desa 1 dokumen Laporan perencanaan dan hasil pemberdayaan desa 2 Laporan Laporan perkembangan dan pemberdayaan desa 1 Laporan	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pemberdayaan Desa 1 Dokumen Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Lombok Tengah		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan 3 dokumen Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan 3 Dokumen	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					Laporan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan	2 Laporan					
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit 5 Unit 9 Unit 10 Unit 13 Unit	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kab. Lombok Tengah	
							7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan 12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	100 % 60 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan K : Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Dokumen) Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12 laporan 3 dokumen 1 Laporan 1 dokumen 1 Dokumen 3 dokumen	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Dokumen) Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Ketntraman dan Ketertiban	1 dokumen 2 Dokumen						
						7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
			7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban laporan hasil koordinasi penyelenggara trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditangani Persentase Gangguan Trantibum yang di tangani	2 Dokumen 2 dokumen 25 persen 100 %	7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan 2 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang dilimpahkan Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	100 % 100 % 100 %	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	K : Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dokumen) Laporan hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 3 dokumen 3 Dokumen 3 Laporan	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15 Orang	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Laporan Hasil Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dokumen)	4 Laporan 1 Dokumen 1 dokumen						
						7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Orang 15 Orang 30 Orang 56 Orang 100 Orang 200 Orang 225 Orang	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan Umum	3000 Orang 1 Dokumen		
						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen 2 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	93 %	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa K : Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen) Laporan hasil fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan 2 dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 5 dokumen	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dokumen) Laporan Hasil Koordinasi dengan pemerintah desa laporan hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Desa yang menyampaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	5 Laporan 4 Laporan 1 dokumen 1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen						
					7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
					7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
					7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
					7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Kab. Lombok Tengah			
					7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	Kab. Lombok Tengah			

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi	Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		
								Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		
							7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Lombok Tengah
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	B Predikat	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 dokumen	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	19 dokumen	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah
							8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum PD	1 dokumen	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
						8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD Tercatat	2 dokumen	8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		Kab. Lombok Tengah	
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemerintahan daerah	12 dokumen	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Kondisi Baik	14 unit	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Lombok Tengah	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan		8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	2 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	KARAKTER KEBANGSAAN	Program	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			
					8.01.02.2.01.02 Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen			
					8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 465 Orang			
					8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang			
					8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 12 Laporan			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU - % Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik 50 % Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi 100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Wawasan/Pemahaman Organisasi Politik 100 persen	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun 3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
					8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 3 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		
					8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 34 Orang	Kab. Lombok Tengah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
							8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	Kab. Lombok Tengah	
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	90 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan Organisasi Masyarakat	100 persen	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	Kab. Lombok Tengah	
							8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	253 Orang	Kab. Lombok Tengah	
							8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	Kab. Lombok Tengah	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan		Kab. Lombok Tengah	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	46.15 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) 6 Desa	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	3 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	825 Orang		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Orang		Kab. Lombok Tengah	
						8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan			
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	Persentase penyelesaian konflik sosial	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kapasitas Deteksi dan Pencegahan Potensi Konflik	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	4 Dokumen		Kab. Lombok Tengah	

No	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Program	Program		Kegiatan		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang melibatkan	Lokasi Sub	Ket.	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja							Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian	Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
						8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan	Keluaran Sub Kegiatan Jumlah Kebijakan di Bidang	Target Capaian 4 Dokumen	Kegiatan		
						Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		Lombok Tengah		
						8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	61 Orang	Kab. Lombok Tengah		
						8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	Kab. Lombok Tengah		
						8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	Kab. Lombok Tengah		
						8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Lombok Tengah		

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.390.773.300.109	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	798.217.813.160	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	798.217.813.160	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	601.080.562.523	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.937.537	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.933.098	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.004.439	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	600.088.749.110	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	599.657.320.560	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.000.050	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	328.403.400	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.025.100	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.070	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.070	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.029.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1.029.000	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.023.056	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.022.416	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.140	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.128.580	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.528.580	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	363.600.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.495.170	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.495.170	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	196.994.298.269	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.379.124.638	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 2,01 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	5.730.660.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	208.805.000	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 2,01 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.198.317.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Plafon Anggaran Sementara	Ket
1			2			3	4
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.268.306.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.870.000.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	54.900.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	133.901.929
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.456.438.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	108.055.950
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96.475.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.286.400.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	68.109.750
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.021.536.119
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.999.890
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	875.220.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48.963.749.001
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.175.000.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	447.410.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	416.574.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	434.055.000
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2	2,02	6	Pembangunan Laboratorium	3.906.552.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	306.474.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.875.000.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	150.000.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	125.000.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	117.000.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	63.000.230
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	543.600.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75.060.000
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.327.023.881
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.999.890
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.737.224.350
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4.417.391.300

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	349.282.700	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.065.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	429.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	648.750.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20.000.070	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.220.400.000	
1	1	1.01.0.00.0.00.01.0000	2 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.585.400.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.914.200.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	30.000.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.882.200.000	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	12.001.800	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.500	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2.001.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2.001.300	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	124.949.728	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	124.949.728	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	124.949.728	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	4.000.560	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.000.280	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.02	01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06 2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.280	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	06 2.01	03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	2.000.280	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	400.175.263.690	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	215.150.372.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.988.470.359	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.895.123	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	67.850.303	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36.520.795	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134.524.025	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	89.067.047.750	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1 2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.932.917.059	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.925.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	125.205.691	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.428.440	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1 2,05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.428.440	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.963.696	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.696.170	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1 2,06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.607.051	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000	1 2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.706.475	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.954.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.398.296.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.296.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.839.350	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.414.350	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.425.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	00	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	119.762.723.378	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	00	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	56.558.557.832	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,01	2	Pembangunan Puskesmas	16.265.431.911	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	23.400.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	133.882.210	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.407.053.811	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	56.657.900	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	30.150.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.250.382.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	00	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.778.284.181	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	932.358.244	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.376.892.218	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.952.435	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.984.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.490.650	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.986.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.986.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.127.465.068	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.475.185	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		2	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	2.403.388.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	496.466.221	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.961.417.666	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	191.817.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.890.504.294	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	72.442.654	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	44.993.450	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.449.204	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.353.438.711	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.04	03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.353.438.711	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.696.546.643	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.696.546.643	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03 2.03	01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.696.546.643	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	562.464.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04 2.01	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	547.464.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04 2.03	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	547.464.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	140.168.290	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.168.290	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05 2.02	01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	140.168.290	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0001		Puskesmas Teratak	2.737.767.128		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.737.767.128		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.737.767.128	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	396.256.254
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0001	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.930.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.415.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.645.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	142.028.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	93.850.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	53.765.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.500.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0001	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	198.721.120
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.715.669.874
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	38.986.280
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Darek	2.819.249.713		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.819.249.713	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.819.249.713
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	345.055.713
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.105.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45.265.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	162.060.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98.725.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54.870.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	70.882.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0002	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	118.415.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.859.112.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0002	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.760.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Batujai	1.541.122.490		

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.541.122.490	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.541.122.490	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	535.659.211	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.915.984	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.204.920	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.849.840	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	65.021.928	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	84.617.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	26.924.920	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	83.944.360	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0003		2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.839.680	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003		02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	649.943.999	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0003		2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	3.200.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0004					Puskesmas Tanak Beak	1.704.581.768	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.704.581.768	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.704.581.768	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	394.984.534	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.520.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.760.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.420.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	139.263.140	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	104.425.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.280.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	32.890.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0004		2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	110.786.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	835.978.994	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0004		2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	30.273.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004		02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	18.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0005					Puskesmas Wajegeseng	1.532.296.247	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.532.296.247		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.532.296.247	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	496.829.792
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.520.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.360.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	111.870.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	25.575.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.680.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.640.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0005	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	138.654.455
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	696.762.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0005	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	24.725.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4.320.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0006				Puskesmas Mantang	2.905.926.273
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.905.926.273
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.905.926.273
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	382.197.704
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	120.900.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0006	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.365.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	72.860.035
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0006	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	233.910.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.885.103.534
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0006	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	31.150.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	14.240.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0007				Puskesmas Praya	5.851.575.227
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	804.857.648
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0007	1	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	804.857.648

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	804.857.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.046.717.579	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.046.717.579	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	549.600.914	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	336.728.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	80.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	88.275.056	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.780.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0007	2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	284.930.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.618.003.209	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0007	2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	12.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Mangkung	2.697.152.355	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.688.752.355	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.688.752.355	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	423.673.452	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.330.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75.608.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	181.564.226	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0008	2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	374.696.170	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.496.879.807	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.400.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Mujur	2.647.946.761	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.647.946.761	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	2.647.946.761	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1					2	3	4
					Kabupaten/Kota		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	397.194.441	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.790.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	23.370.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	161.460.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	103.160.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	51.695.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30.450.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0009	2	2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	121.806.320	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.687.896.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0009	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	39.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	2.325.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0010			Puskesmas Pengadang	3.679.160.089	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.679.160.089	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.679.160.089	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	283.859.571	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.080.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	26.160.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	196.239.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.671.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.630.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	52.200.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.600.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0010	2	2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92.360.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.646.360.018	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0011			Puskesmas Ubung	3.049.613.529	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.022.613.529	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02	11 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.022.613.529	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	410.765.809	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	25.390.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.709.390	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	201.274.110	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	74.814.400	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0011	2 2,02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 17 Lingkungan	33.364.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.910.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0011	2 2,02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	172.629.999	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.021.615.721	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0011	2 2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	56.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	11 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03 2.02	11 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	27.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	03 2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	27.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Bagu	2.361.236.061	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	12 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.361.236.061	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02	12 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.361.236.061	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	422.382.236	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	29.570.720	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.290.360	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	36.160.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	12.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.490.360	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.345.720	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	76.206.500	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0012	2 2,02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	198.440.550	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.456.991.735	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0012	2 2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	18.102.160	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02 2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	14.855.720	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Pringgarata	3.011.371.238	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.011.371.238	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.011.371.238	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	316.514.058	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.750.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	57.810.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.720.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	194.539.375	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.365.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	52.100.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	64.490.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0013	2 2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.017.805	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.944.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0013	2 2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	42.600.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0013	2 2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	41.465.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Aik Darek	3.710.458.610	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.242.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.001	1 2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	283.242.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	01 2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	283.242.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.387.261.610	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.387.261.610	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	425.357.610	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	79.870.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.536.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.409.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	70.725.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0014	2 2,02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	117.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.342.814.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02 2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	39.955.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	39.955.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	03 2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	39.955.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Aik Mual	3.815.328.630	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	649.284.982	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0015	1 2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	649.284.982	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01 2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	649.284.982	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.166.043.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.166.043.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	351.180.829	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.300.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33.850.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	30.510.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	216.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	110.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	59.908.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.355.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0015	2 2,02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	223.775.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.060.723.919	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0015	2 2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	38.500.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Sengkol	3.800.118.947	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.800.118.947	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.800.118.947	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	376.596.791	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	75.145.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.160.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	240.908.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90.999.991	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.565.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	327.640.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0016	2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32.240.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2.621.663.965	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0016	02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	7.200.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Kuta	2.303.589.179	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.303.589.179	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.303.589.179	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	371.044.636	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.320.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	125.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	136.120.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.423.841	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	38.640.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0017	2 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	176.490.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0017	02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.368.575.702	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0017	2 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	17.375.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas Batu Jangkih	2.104.155.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.104.155.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.104.155.352	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	329.715.256	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	12.690.180	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.370.540	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0018	2 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.640.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	182.603.750	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	105.470.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	49.043.670	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	63.395.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0018	2 2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	129.426.080	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.157.999.976	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0018	2 2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0018	02 2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Puyung	3.373.881.476	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	634.261.328	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.001	1 2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	634.261.328	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	01 2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	634.261.328	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.739.620.148	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.739.620.148	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	376.153.148	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	80.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	78.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	77.845.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.466.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	166.960.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0019	2 2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	62.835.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0019	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.860.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Penujak	2.412.203.364	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.412.203.364	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.412.203.364	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	366.729.495	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Plafon Anggaran Sementara	Ket
1			2			3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.480.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.320.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	42.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	187.620.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	114.408.960
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.665.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	55.765.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0020	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	108.644.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0020	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.388.370.209
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0020	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	74.600.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0020	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.800.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0021				Puskesmas Ganti	2.212.796.416
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.212.796.416
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.212.796.416
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	284.873.645
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.680.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.280.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.840.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	161.865.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	86.240.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.560.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.680.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0021	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	304.704.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.254.132.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0021	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	30.381.471
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0021	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.760.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0022				Puskesmas Batunyal	2.259.089.350
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.259.089.350

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02	22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.259.089.350	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	355.298.634	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.230.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.560.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8.910.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	163.722.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.275.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22.550.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	35.579.600	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0022	2 2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	253.610.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.292.653.216	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0022	2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.700.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0022	02 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	9.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0023			Puskesmas Langko	2.327.939.404	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.327.939.404	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02		23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.327.939.404
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	401.129.902	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.120.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0023	2 2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.160.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.663.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.830.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	125.080.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.465.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.107.500	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0023	2 2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	202.529.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.225.799.702	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0023	2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.830.300	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0023	02 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	146.225.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0024			Puskesmas Bonjeruk	2.424.486.027	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.424.486.027		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	24	2.424.486.027		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	340.009.794
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.720.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.760.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	139.158.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53.780.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.823.233
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.740.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0024	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	323.175.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.440.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0024	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	50.280.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0024	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	26.040.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0025			Puskesmas Teruwai	1.968.140.854	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.968.140.854	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.968.140.854	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	426.247.841
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.255.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.585.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	144.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33.394.268
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25.970.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50.789.136
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0025	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	210.579.609
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.016.320.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0025	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	12.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0025	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	12.000.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0026			Puskesmas Kopang	2.790.267.168	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.790.267.168	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		26		

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02	26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.790.267.168	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	439.301.366	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.040.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.010.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	129.361.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	132.015.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.980.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	54.881.900	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0026	2 2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.540.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.831.037.802	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0026	2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0026	02 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	21.600.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0027			Puskesmas Muncan	2.703.229.386	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.679.829.386	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02		27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.679.829.386
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	401.306.696	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.149.970	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.800.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	185.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	116.542.420	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	59.523.880	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.733.250	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0027	2 2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	146.437.170	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	02 2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.677.096.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0027	2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	33.140.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23.400.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	23.400.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0027	03 2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	23.400.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0028		Puskesmas Janapria	3.818.146.755	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	935.250.573	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0028	1 2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	935.250.573	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	01 2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	935.250.573	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.882.896.182	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.882.896.182	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	351.752.182	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	191.635.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.200.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159.335.420	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.762.550	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	71.245.890	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0028	2 2,02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	165.365.140	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0028	02 2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.872.000.000	
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0028	2 2,02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	27.600.000	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah	106.462.061.223	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.518.061.223	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.491.182	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.018.172	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.473.010	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.307.862.884	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000	1 2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.167.447.223	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	140.415.661	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.221.157	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.261.157	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.960.000	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000	1 2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	56.000.486.000	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000	01 2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	56.000.486.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
1	02	1.02.1.02.1.02.02.00	00	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.944.000.000	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.00	00	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.944.000.000	
1	02	1.02.1.02.1.02.02.0000		02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.394.065.766	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000		2	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.549.934.234	
1	2	1.02.1.02.1.02.02.0000		2	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.000.000.000	
1	03						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	126.541.137.983	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.541.137.983	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.253.956.168	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.077.520	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.807.500	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.270.020	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.601.416.990	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000		1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.296.617.068	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	287.261.222	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.538.700	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000		1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.609.310	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.943.310	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.666.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.520.640	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.126.976.640	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.544.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.331.708	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.123.270	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.088.208.438	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.355.480.085	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	00	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.355.480.085	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000		02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	6.763.650.850	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02 2.01	49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1.499.824.885	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02 2.01	63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	92.004.350	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	27.736.514.170	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	27.736.514.170	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	18.310.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.426.514.170	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.056.585.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.056.585.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05 2.01	12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	11.056.585.700	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.455.961.160	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.455.961.160	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08 2.01	12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.455.961.160	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.004.735.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.004.735.000	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	9 2.01	3 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.004.735.000	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	55.261.242.260	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	55.261.242.260	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	244.790.880	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	178.615.880	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	8 Rekonstruksi Jalan	49.139.866.800	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	10 Pemeliharaan Berkala Jalan	1.287.968.700	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	3.210.000.000	
1	3	1.03.0.00.0.00.01.0000	10 2.01	16 Penggantian Jembatan	1.200.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	416.663.440	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	209.485.480	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	209.485.480	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	124.766.480	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	124.766.480	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	82.411.480	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	82.411.480	
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.921.317.618	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.921.317.618	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.260.025.743	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.332.461	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.332.461	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.956.766.062	
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.932.369.000	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.397.062	
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.698.100	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.780.100	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.918.000	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.456.000	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.648.000	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.808.000	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.773.120	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.773.120	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	68.978.569	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.897.701	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.897.701	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12.080.868	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12.080.868	
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.232.578.341	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	04	1.04.1.03.2.10.01.00	03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	62.031.993	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	62.031.993	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.00	03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.170.546.348	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	205.836.948	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	964.709.400	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.00	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24.359.734.965	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.00	05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	24.359.734.965	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	24.359.734.965	
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.715.106.118	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja	10.642.620.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.755.057.965	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.264.624	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.819.936	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.376.740	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.376.740	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.376.740	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.376.740	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.937.728	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.099.568.092	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.086.409.292	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.453.480	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.705.320	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.658.629	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.220.075	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.021.480	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.310.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.377.285	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 7	Penyediaan Bahan/Material	7.561.789	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.168.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.675.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.675.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.965.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.965.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.925.920	
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0000	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.664.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.076.120	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.785.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.887.562.435	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.258.098.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.238.568.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12.810.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.720.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.629.464.435	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	913.542.607	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	715.921.828	
1	5	1.05.0.00.0.00.04.0000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.072.485.718	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.683.301.622	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.517.780	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.499.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.500.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.499.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.018.180	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.886.731.519	
1	5	1.05.0.00.0.00.04.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.777.909.041	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.890.962	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.418.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.513.116	
1	5	1.05.0.00.0.00.04.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.304.020	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.129.020	
1	5	1.05.0.00.0.00.04.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.915.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.560.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.353.152	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.521.152	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.832.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.395.151	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.825.960	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	209.209.191	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.360.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	570.460.921	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	17.923.643	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	17.923.643	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	314.959.736	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	7.901.341	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.561.525	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	242.218.574	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	59.278.296	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	237.577.542	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	237.577.542	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	818.723.175	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	791.108.821	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	04	2.01	02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	735.158.821	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	04	2.01	03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	13.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	04	2.01	06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	42.450.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	27.614.354	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	04	2.04	01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	27.614.354	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.202.661.540	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000			Dinas Sosial	17.202.661.540	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.234.019.379	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.540.336	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.540.336	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.854.613.835	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.843.049.005	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.564.830	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.000	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.141.128	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.855.128	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.286.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.817.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.137.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.680.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.906.780	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.156.780	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.354.837.334	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.874.946	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.874.946	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.348.962.388	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3.598.988	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.200.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.326.163.400	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	969.590.788	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	897.086.531	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	4 2.01 1	Penyediaan Permakanan	158.409.354	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	4 2.01 2	Penyediaan Sandang	4.425.750	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	4 2.01 3	Penyediaan Alat Bantu	96.019.327	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.932.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	628.300.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	72.504.257	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	4 2.02 3	Penyediaan Permakanan	54.472.157	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18.032.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.478.073.676	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.478.073.676	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	573.031.416	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.383.157.260	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	521.885.000	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	157.482.997	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	134.983.527	
1	6	1.06.0.00.0.00.01.0000	6 2.01 1	Penyediaan Makanan	134.983.527	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	22.499.470	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	22.499.470	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	8.657.366	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.657.366	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.657.366	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	119.548.851.443	
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8.538.050.669	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.538.050.669	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.614.854.549	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.158.851	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.363.500	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.083.380	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.711.971	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.165.540.764	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.155.551.108	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.423.276	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.566.380	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.311.388	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.483.460	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.325.928	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.502.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.411.202	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.643.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.768.202	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.432.344	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.882.344	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.550.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	9.035.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	9.035.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	9.035.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.713.210.413		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.547.045.287		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.547.045.287
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	145.012.496	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	145.012.496
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	7.048.474	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	7.048.474
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.104.156	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.104.156
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	107.994.755		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	107.994.755	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	107.994.755
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	92.955.952		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.200.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50.200.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	42.755.952	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.755.952
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.339.085.573		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5.339.085.573		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.584.406.522		
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.449.648	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.274.688
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.174.960

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.179.405.320	
2	8	2.08.2.14.0.00.02.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.179.405.320	
2	8	2.08.2.14.0.00.02.000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.447.838	
2	8	2.08.2.14.0.00.02.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.435.838	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.012.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.082.438	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.866.438	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.216.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.021.278	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.774.418	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.246.860	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.800.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	02 2,01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.800.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	02 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2.800.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	225.224.845	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	03 2,01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	114.679.652	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	03 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	111.353.452	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	03 2,01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.326.200	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	03 2,02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.575.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	03 2,02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.575.000	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	03 2,03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.970.193	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	03 2,03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.970.193	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	255.019.677	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.019.677	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	04	2.01	03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	255.019.677	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.340.032	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.340.032	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	06	2.01	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.340.032	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	203.294.497	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.163.052	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	07	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.163.052	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.351.552	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	07	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.493.052	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	07	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	134.858.500	
2	8	2.08.2.14.0.00.02.0000	7	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.779.893	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.0000	07	2.03	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.779.893	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.221.638.997	
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000			Dinas Ketahanan Pangan	3.221.638.997	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.386.003.425	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.054.140	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.014.240	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.123.600	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.085.960	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.382.700	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1					2	3	4
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.155.880
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.225.800
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.065.960
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.206.609.171
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.197.051.011
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.162.080
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.396.080
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.344.960
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.927.030
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.547.930
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.870.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.613.110
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.717.110
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.896.000
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.382.044
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.382.044
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	304.865.940
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	304.865.940
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	124.999.840
2	9	2.09.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	179.866.100
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	327.229.940
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	88.386.725
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.104.980
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	24.631.840
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	23.090.600
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	19.919.545
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	10.639.760

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	238.843.215	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	13.296.282	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	199.999.908	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	25.547.025	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	176.324.887	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	41.253.100	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	41.253.100	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.071.787	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.071.787	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.214.805	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.214.805	
2	09	2.09.0.00.0.00.01.0000	05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.214.805	
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	34.985.530	
1	04	1.04.1.03.2.10.01.00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.985.530	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.00	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	11.666.522	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.00	05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.666.522	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.666.522	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.00	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	11.632.662	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.00	08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	11.632.662	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	11.632.662	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	11.686.346	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.00	10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	11.686.346	
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	11.686.346	
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.300.174.688	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	10.300.174.688	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.039.976.420		
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.350.500	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.328.000
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.531.500
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.531.500
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.336.500
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.623.000
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.400.077.688	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.400.077.688
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		1	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.765.168	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.765.168
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.466.444	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.839.444
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	378.627.000
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.316.620	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.316.620
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	78.918.695	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	78.918.695	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	24.792.752
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19.448.000
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	34.677.943
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	21.113.359	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	21.113.359	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000		04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	21.113.359
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	73.678.908	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.00	00	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73.678.908	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1					2	3	4	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	23.046.720	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.632.188	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.966.710	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.966.710	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.966.710	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.066.520.596	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2		Pengelolaan Sampah	4.066.520.596	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	593.971.122	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.512.496.774	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	196.312.700	
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	763.740.000	
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.227.504.259	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.227.504.259	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.094.002.739	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.547.781	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.157.247	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.060.998	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.080.440	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.132.042	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.576.357	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.118.219	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.422.478	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.160.339.584	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.105.373.040	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.966.544	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.736.554	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	16.736.554	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.490.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.490.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.288.620	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.080.620	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.208.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.600.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.600.200	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	974.558.016	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2 2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	936.408.016	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	10.500.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	925.908.016	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	38.150.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2 2.03 2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	38.150.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	104.177.635	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	3 2	Pelayanan Pencatatan Sipil	55.527.635	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.200.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	30.327.635	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	3 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	48.650.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	48.650.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	45.764.410	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	39.964.410	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	39.964.410	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.800.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.001.459	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5 2	Penyusunan Profil Kependudukan	9.001.459	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9.001.459	
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.216.585.145	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.216.585.145	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.202.458.174		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.523.408	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.756.887
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.766.521
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.910.465.376	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.374.249
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.091.127
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.224.646		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.066.646
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.600.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.558.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.833.424	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.453.424
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.380.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.411.320	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.411.320
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.058.906.525		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		3	2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.058.906.525	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.300.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.047.606.525
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.371.023.465		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.371.023.465	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	19.107.321
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.958.226
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.052.769.118
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	82.999.984
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	8.125.900
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.058.709
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	55.255.052
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	12.621.000
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000		04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59.128.155

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	584.196.981	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.00	05	2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	584.196.981	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	62.997.875	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	81.199.861	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.999.747	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	24.999.749	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	399.999.749	
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.055.545.159	
2	08	2.08.2.14.0.00.02.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	12.055.545.159	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.173.588	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.00	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.173.588	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.173.588	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	314.709.562	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.00	02	2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	314.709.562	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2	2,02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.016	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	02	2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	43.509.546	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	02	2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	135.000.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	02	2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	72.000.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.00	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.254.864.586	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.00	03	2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.168.607.655	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1					2	3	4	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.160.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	77.514.768	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	157.011.099	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.240.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	577.801.788	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	79.880.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	350.270.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62.000.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10.270.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	278.000.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.663.189.931	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.809.700	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.544.449.617	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.023.200.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.100.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	22.630.614	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.072.797.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	746.877.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	325.920.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.450.797.423	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.450.797.423	
						Pengadaan Sarana Kelompok		

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	4 2,01 2	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	364.176.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	17.521.423	
2	14	2.08.2.14.0.00.02.0000	04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.069.100.000	
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.888.031.561	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	16.888.031.561	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.294.343.550	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.354.100	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.618.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.735.400	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.759.956.269	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.735.626.659	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.329.610	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.671.480	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.671.480	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.901.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.901.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.233.958	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.249.958	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.984.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.910.683	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.230.683	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.680.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.315.360	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.315.360	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.523.079.781	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.100.502.138	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11.009.702.138	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	90.800.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	125.890.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	125.890.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2 2,1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	692.151.803	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2 2,05 1	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	434.151.803	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	422.675.840	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	422.675.840	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	97.890.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	97.890.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.970.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.970.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	70.608.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03 2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.608.230	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	70.608.230	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.081.799.005	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	5.081.799.005	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.361.038.748	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.549.440	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.499.920	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.299.700	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1					2	3	4	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.699.920	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.999.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.785.310.576	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.778.525.682	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.017.415	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.767.479	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.294.453	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.522.553	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.771.900	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.084.554	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	16.084.554	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.146.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.146.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.653.425	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.653.425	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	837.351.211	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	837.351.211	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	753.709.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	52.490.311	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	31.151.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	883.409.046	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	883.409.046	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	852.206.946	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	31.202.100	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.035.032.886	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	21.035.032.886	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.634.555.797	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.077.240	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.548.080	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.042.485	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.351.805	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.134.870	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.292.229.076	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.288.295.643	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.371.688	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.561.745	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.060.275	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.060.275	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.445.270	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.265.270	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.180.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.210.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.808.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.402.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.533.936	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.533.936	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	12.389.100	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.389.100	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.389.100	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	198.120.550	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	198.120.550	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	112.320.275	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.800.275	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	457.769.806			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	05	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	199.608.803			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	199.608.803	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	05	2.02 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	258.161.003			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	258.161.003	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	43.981.620			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	06	2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.981.620			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.981.620	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	8.024.799.123			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	07	2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	8.024.799.123			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.024.799.123	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.000	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.663.416.890			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.00	08	2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.663.416.890			
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.663.416.890	
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.244.462.201			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.244.462.201			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.631.109.297			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.000	1	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.456.001			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.021.124	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.975.252	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.179	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.550.354	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.472.516	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1						2	3	4
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.626.319	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.010.257	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.912.133.448	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.890.047.168	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.354	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.585.926	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.626.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.892.244	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.462.028	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.272.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.001.280	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.105.280	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.896.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.892.296	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.311.686	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.100.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.480.610	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.901.993	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.901.993	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	11.242.558	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16.659.435	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	53.270.194	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.270.194	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	53.270.194	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	95.280.717	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	95.280.717	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1					2	3	4
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis	
						Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	57.728.462
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	14.788.255
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4.500.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18.264.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	406.900.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	406.900.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	306.892.760
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.007.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.617.187.741
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.617.187.741
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.596.847.935
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.636.992
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.599.804
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.521.445
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.515.743
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.156.794.473
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.151.795.300
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.499.200
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.499.973
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.714.427
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.714.427
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.794.844
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.181.644
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.640.000

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.973.200	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.812.154	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.812.154	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.104.685	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.998.500	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.106.185	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.990.360	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.990.360	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	397.951.944	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	176.843.232	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	74.928.649	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	34.971.780	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	704.816	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	66.237.987	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.108.712	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	221.108.712	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.513.999.480	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.466.197.998	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.466.197.998	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.124.910.544	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5.124.910.544	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	600.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	600.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	322.890.938	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	216.199.052	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	106.691.886	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	108.388.382	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	108.388.382	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	108.388.382	
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	117.183.426	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	117.183.426	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	117.183.426	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	117.183.426	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	117.183.426	
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.487.100	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	20.487.100	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.487.100	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.487.100	
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.487.100	
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.617.575.900	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.617.575.900	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.528.935.900	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.528.935.900	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.528.935.900	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	88.640.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	88.640.000	
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	5	2,02	1	Pelindungan Cagar Budaya	88.640.000	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.874.323.947	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.874.323.947	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.142.871.246	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.300.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.300.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.818.578.541	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.818.578.541	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.000	1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.816.183	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.748.183	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.068.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	926.340	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	926.340	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.562.062	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.467.712	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.094.350	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.688.120	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.688.120	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.000	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	727.532.701	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.865.097	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	24.015.328	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.400.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	63.751.644	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2 2.01 8	Pengembangan Bahan Pustaka	52.910.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	24.788.125	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	552.667.604	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	9.706.395	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	541.944.362	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.016.847	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	3.920.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	3.920.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	3.920.000	
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	119.197.656	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	119.197.656	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.000	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	107.631.960	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	93.268.760	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.02	02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	93.268.760	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	14.363.200	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02 2.03	02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	14.363.200	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	11.300.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	11.300.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03 2.01	01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	11.300.000	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	265.696	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	265.696	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	04 2.01	02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	265.696	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	122.679.580.389	
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.204.735.856	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	10.204.735.856	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.293.892.289	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.800.849	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.936.394	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.369.618	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.308.118	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.456.044	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.084.087	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.646.588	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.626.393.259	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1 2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.580.792.457	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1 2,02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.113.145	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1 2,02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.487.657	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.974.002	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.105.429	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.979.283	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	1 2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.060.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1					2	3	4
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.067.290
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.762.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.772.564
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.660.564
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.112.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.951.615
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.802.232
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.670.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.479.383
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.655.355.836
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	22.476.112
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	22.476.112
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.525.619.120
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.498.104.791
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	19.881.775
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7.632.554
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	93.410.280
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	93.410.280
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.850.324
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	13.850.324
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.866.487.564
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.866.487.564
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	757.356.673
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.109.130.891

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	00	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	389.000.167	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	00	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	17.702.109	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000		06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.702.109	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	00	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	105.870.959	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000		06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	105.870.959	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.00	00	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	265.427.099	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000		06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.427.099	
3	26						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.621.412.773	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.621.412.773	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.227.031.394	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.606.064	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.138.031	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.997.860	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.099.460	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.554.820	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.590.472	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.858.156	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.367.265	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.826.188.762	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.669.705.052	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.838.050	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	150.645.660	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.000	1	2,1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.130.754	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.205.754	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.819.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.106.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.411.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.411.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.694.814	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.694.814	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.814.334.216	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.814.334.216	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.569.750.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	87.109.216	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	157.475.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	286.836.413	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	286.836.413	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	248.254.929	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	20.170.539	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	18.410.945	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.293.210.750	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.085.296.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.085.296.000	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.00	05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	207.914.750	
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	207.914.750	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	64.374.882.331	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	64.374.882.331	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.674.466.248	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.996.780	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.443.681	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.942.404	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.921.618	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.424.782	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.424.343	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1						2	3	4
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.333.389	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.506.563	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.989.599.646	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.941.740.120	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.682.526	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.177.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.095.402	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.025.425	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.183.723	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.614.704	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.365.550	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.906.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.953.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.577.400	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.376.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.821.020	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.821.020	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	25.410.623.609	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	17.095.623.609	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	11.485.988.046	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.609.635.563	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.315.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	8.315.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.470.825.658	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	6.470.825.658	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.525.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	950.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.120.000.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	875.825.658	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	50.922.344	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	17.922.344	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	17.922.344	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	33.000.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	75.896.100	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	75.896.100	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	75.896.100	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	172.173.797	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	172.173.797	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	172.173.797	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.519.974.575	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.519.974.575	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.250.875.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	269.099.575	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.149.221.721	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.149.221.721	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.848.017.748	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.695.909.778	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.695.909.778	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	152.107.970	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	152.107.970	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	161.492.836	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.492.836	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	5	2,01	2	Pameran Dagang Nasional	161.492.836	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
3	30	3.31.3.30.0.00.02.00	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	139.711.137	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.00	06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	139.711.137	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	89.355.900	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	50.355.237	
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	31.315.452.919	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31.315.452.919	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.253.010.215	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.837.534	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.468.832	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.893.356	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.972.108	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.109.738	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.017.800	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.375.700	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.620.541.705	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.596.445.500	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.542.205	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.554.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.000	1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.856.538	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.538	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.020.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.836.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.417.013.358	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.331.113.358	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.900.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.761.080	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.311.080	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.00	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	25.062.442.704	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.000	2 2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	25.062.442.704	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	7.026.324.710	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12.149.668	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.532.668.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16.491.300.326	
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	13.874.789	
2	7	2.07.3.32.0.00.01.0000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.874.789	
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13.874.789	
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.874.789	
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.874.789	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	75.617.621.451	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH	30.131.587.137	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	30.131.587.137	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.380.366.395	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.079.924	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.142.670	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.313.150	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.020	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	12.325.731	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.289.436	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.999.904	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.009.013	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.471.348.528	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.387.214.200	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.005.365	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.128.963	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.020.656.847	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.435.034.940	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.472.307	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.685.600	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.464.000	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.517.103.080	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	510.812.000	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.366.883.080	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639.408.000	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773.824.635	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750.354.635	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.470.000	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	809.052.740	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	149.570.660	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.482.080	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	728.815.220	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	264.032.980	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	264.032.980	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	200.749.260	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.1	Penataan Organisasi	290.485.583	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	74.625.003	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.105.312	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	156.755.268	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	654.999.838	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.14 1	Fasilitasi Keprotokolan	424.950.423	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.14 2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	80.006.109	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	1 2.14 3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	150.043.306	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.713.301.645	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	2 2	Administrasi Tata Pemerintahan	201.777.903	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.103.298	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	151.674.605	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.920.185.871	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.281.289.871	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	625.000.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	13.896.000	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.000	2 2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	550.121.943	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	230.374.831	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	2 2.03 2	Fasilitasi Bantuan Hukum	200.834.038	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	118.913.074	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.000	2 2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	41.215.928	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	2 2.04 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.215.928	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.037.919.097	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.000	3 2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	227.991.646	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	81.962.431	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	20.209.694	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	125.819.521	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	300.187.118	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	76.130.665	
4	1	4.01.5.02.0.00.01.0000	3 2.02 2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.803.382	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	75.253.071	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	460.749.523	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	115.692.646	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	156.465.916	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	188.590.961	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	48.990.810	
4	01	4.01.5.02.0.00.01.0000	03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	48.990.810	
4	2			SEKRETARIAT DPRD	45.486.034.314	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	45.486.034.314	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.508.389.193	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.753.140	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.715.353	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.927.718	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.828.383	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.281.686	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.645.595.530	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.616.761.445	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2			3	4
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.857.505	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.464.803	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.511.777	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.000	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.123.667.596	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.349.923	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	91.147.812	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271.143.146	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.202.687	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	263.400.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.900.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.524.028	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	493.831.761	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	493.831.761	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.953.813.320	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.933.320	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.880.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.085.992	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.079.140	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.486.300	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192.520.552	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.478.442.722	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.241.893.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	219.049.122	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	17.500.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.000	1	2,2		Layanan Administrasi DPRD	282.199.132	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2,16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	35.632.117	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	246.567.015	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.977.645.121	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.505.243.225	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	13.130.872	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.290.162.353	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	201.950.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	455.021.424	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.02 1	Pembahasan KUA dan PPAS	107.146.735	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	106.717.975	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.02 3	Pembahasan APBD	67.977.896	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.02 4	Pembahasan APBD Perubahan	133.298.516	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	39.880.302	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	253.922.845	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	42.778.219	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	42.794.436	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	42.833.436	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	42.852.936	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	42.817.219	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	39.846.599	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.904.913.067	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.04 2	Pendalaman Tugas DPRD	1.527.712.724	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.04 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.639.129.634	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	410.400.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.04 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	324.000.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.670.709	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.940.263.375	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.05 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	42.615.733	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.568.381	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	3.885.079.261	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.1	Fasilitasi Tugas DPRD	918.281.185	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	874.760.000	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.08 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	7.388.261	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	31.322.219	
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2 2.08 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.810.705	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	438.535.709.122	
5	1			PERENCANAAN	9.454.378.130	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	9.454.378.130	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.226.859.466	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.056.541	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.190.809	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.672.933	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.327.574	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.358.192	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.507.033	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.356.361.243	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.237.443.892	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.931.906	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	102.985.445	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.105.141	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.605.141	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.760.255	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.396.776	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.363.479	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.846.490	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.562.300	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.876.190	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.408.000	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.801.256	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	1 2,07 5	Pengadaan Mebel	102.110.700	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.690.556	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.928.540	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.928.540	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.076.846.098	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	517.410.761	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	25.174.249	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	2 2,01 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	23.243.243	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.092.345	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	325.355.973	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	25.737.417	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	77.807.534	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	200.430.433	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	127.943.649	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	72.486.784	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	359.004.904	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	270.604.110	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	88.400.794	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.150.672.566	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	606.588.052	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.030.621	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31.042.812	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	27.180.000	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	95.962.922	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	170.546.725	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.261.100	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.326.070	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	139.237.802	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	860.754.715	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	332.999.903	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	46.056.385	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	123.966.604	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	70.542.102	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.227.872	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.918.770	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	62.884.004	
5	1	5.01.5.05.1.03.02.0000	3 2,02 8	dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	86.159.075	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	683.329.799	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66.534.300	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	69.010.400	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55.644.400	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	201.600.200	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.574.811	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	63.304.318	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	65.681.085	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000	03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	79.980.285	
5	2			KEUANGAN	421.462.319.466	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.938.036.339	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.721.720.352	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.647.673	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.609.226	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.038.447	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.710.682.734	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.672.237.649	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.815.605	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.519.695	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.094.922	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.014.863	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.097.612	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.097.612	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.277.780	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.805.780	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.472.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	441.244.793	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1 2,07 5	Pengadaan Mebel	68.108.250	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.703.363	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.822.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.350.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.472.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.947.760	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.947.760	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	355.136.531.516	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.145.526.230	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	798.245.910	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	41.431.872	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	49.602.985	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	41.229.018	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	19.854.445	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.044.554	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	47.862.520	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01	08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	43.119.372	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01	09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	51.795.544	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01	10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14.916.735	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.01	11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	19.423.275	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	303.928.335	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	86.175.529	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.751.480	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	2 2,02	4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.024.628	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	163.094.761	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6.150.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.02	09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	21.731.937	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	226.439.273	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.03	01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.272.478	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.03	03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	29.704.118	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.03	04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	64.455.541	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.03	05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	105.007.136	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	353.397.333.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.04	04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	13.009.461.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.04	08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	312.081.958.160	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.04	09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02 2.04	10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.305.914.140	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.00	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	63.303.878	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.05	02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	63.303.878	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.00	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.079.784.471	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	3	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.079.784.471	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	3	2,01	1 Penyusunan Standar Harga	259.935.240	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2,01	03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.862.941	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	3	2,01	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	160.194.573	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	3	2,01	7 Pengamanan Barang Milik Daerah	270.234.237	
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	3	2,01	8 Penilaian Barang Milik Daerah	176.477.597	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2,01	09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	79.333.385	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2,01	10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17.098.476	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2,01	11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	106.648.022	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	20.524.283.127	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.230.149.425	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.583.240	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.286.620	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.386.180	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.910.440	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.210.028.643	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.182.975.303	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.458.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.594.640	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.382.752	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	551.523.702	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.210.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.709.050	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.548.000	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.108.000	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	1	2,08	4 Kantor	61.440.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.606.790	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2,09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.723.920	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01 2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.882.870	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.294.133.702	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.294.133.702	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04 2.01	01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	50.250.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04 2.01	03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	43.232.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04 2.01	05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	526.268.252	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	4 2.01	11 Penagihan Pajak Daerah	604.660.000	
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	4 2.01	12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12.139.650	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04 2.01	13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	57.583.200	
5	3			KEPEGAWAIAN	6.024.697.618	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6.024.697.618	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.079.482.917	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.717.751	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.853.522	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.808.484	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.647.709	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.455.418	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	1 2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.952.618	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.111.634.010	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.079.764.459	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.351.087	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.518.464	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.708.422	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.708.422	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.464.778	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.464.778	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	666.822.390	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	575.839.500	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.898.890	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	1 2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.484.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.520.400	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.714.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.805.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.615.166	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.615.166	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	945.214.701	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	497.452.484	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12.567.483	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	158.811.205	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	33.594.123	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100.570.708	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	172.446.576	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	19.462.389	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2	Mutasi dan Promosi ASN	237.664.584	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,02 1	Pengelolaan Mutasi ASN	30.654.633	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,02 2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	43.546.549	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,02 3	Pengelolaan Promosi ASN	163.463.402	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2	Pengembangan Kompetensi ASN	81.188.902	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,03 2	Pengelolaan Assessment Center	12.139.888	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	13.339.472	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,03 6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	31.952.582	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	23.756.960	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	128.908.731	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	20.291.270	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	29.221.738	
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2,04 7	Pembinaan Disiplin ASN	51.737.131	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	19.392.158	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	8.266.434	
5	4			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.209.385.512	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.209.385.512	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.209.385.512	
5	4	5.03.5.04.0.00.01.0000	2 2	Pengembangan Kompetensi Teknis	117.160.196	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	65.540.418	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.01	03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	51.619.778	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.092.225.316	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02 2.02	07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.092.225.316	
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	384.928.396	
5	01	5.01.5.05.1.03.02.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	384.928.396	
5	05	5.01.5.05.1.03.02.0000	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	384.928.396	
5	05	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	84.885.659	
5	5	5.01.5.05.1.03.02.0000	2 2,02	10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	84.885.659	
5	5	5.01.5.05.1.03.02.0000	2 2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	300.042.737	
5	05	5.01.5.05.1.03.02.0000	02 2.04	04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	300.042.737	
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.070.869.923	
6	1			INSPEKTORAT DAERAH	14.070.869.923	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	14.070.869.923	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.654.379.645	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.413.705	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.262.249	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.189.821	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.964.821	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.189.821	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.909.685	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.897.308	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.273.556.226	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.250.061.844	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.494.382	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.856.312	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.856.312	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.345.388	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.495.124	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.910.264	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.940.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.348.254	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	1 2.07 5	Pengadaan Mebel	49.348.254	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.859.760	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.859.760	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.647.610.947	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	2 2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.236.938.107	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.540.109.630	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	696.828.477	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	410.672.840	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	2 2.02 2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	410.672.840	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	768.879.331	
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	3 2	Pendampingan dan Asistensi	768.879.331	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	291.683.368	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	477.195.963	
7				UNSUR KEWILAYAHAN	58.397.372.711	
7	1			KECAMATAN	58.397.372.711	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kantor Camat Praya	10.049.101.293	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.297.205.019	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.300.426	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.205.268	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.470.709	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.979.516	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.611.516	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.101.622	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.576.871	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.354.924	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.574.874.792	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.424.373.097	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.461.720	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	147.039.975	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.479.342	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.817.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.771.842	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.890.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.153.849	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	9.720.669	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.929.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.929.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.467.610	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.152.129	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.030.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.285.481	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	198.124.496	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.380.866	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	122.380.866	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75.743.630	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	75.743.630	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.714.355	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.714.355	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.714.355	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.770.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.770.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.770.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	484.111.745	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	484.111.745	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	454.486.745	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.625.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.175.678	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.175.678	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.175.678	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0001		Kelurahan Gonjak	1.210.302.982	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.210.302.982	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0001	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.210.302.982	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.552.814	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	514.079.828	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0001	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	661.002.340	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0001	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	27.668.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0002		Kelurahan Semayan	1.106.528.545	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.106.528.545	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0002	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.106.528.545	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.128.165	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	145.318.322	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0002	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	897.998.058	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0002	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	54.084.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0003		Kelurahan Tiwugalih	1.336.691.188	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.336.691.188	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0003	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.336.691.188	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.846.205	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	300.626.412	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0003	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	972.893.293	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0003	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	55.325.278	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004		Kelurahan Prapen	1.478.411.873	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.478.411.873	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.478.411.873	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0004	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.465.468	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	845.764.080	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	594.948.325	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	29.234.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0005				Kelurahan Leneng	1.456.243.559	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.456.243.559	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.000	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.456.243.559	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.064.039	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	665.131.360	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	743.755.160	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0005	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	40.293.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0006				Kelurahan Gerunung	1.315.651.908	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.315.651.908	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.000	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.315.651.908	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.124.182	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	816.303.726	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0006	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	462.600.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0006	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	28.624.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0007				Kelurahan Praya	1.253.436.889	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.253.436.889	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.000	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.253.436.889	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.877.827	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	331.911.807	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0007	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	844.149.255	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0007	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	65.498.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0008				Kelurahan Panjisari	1.024.629.905	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.024.629.905	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.000	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.024.629.905	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.239.141	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	198.020.340	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0008	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	764.828.424	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0008	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	49.542.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0009				Kelurahan Renteng	1.256.412.923	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.256.412.923	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7 1	7.01.0.00.0.00.01.000	3	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.256.412.923	
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0009	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.623.970	
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0009	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	494.477.871	
7 01	7.01.0.00.0.00.01.0009	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	682.323.082	
7 1	7.01.0.00.0.00.01.0009	3	2,02	4 Evaluasi Kelurahan	71.988.000	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000			Kantor Camat Praya Tengah	5.272.620.424	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.661.163.047	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.949.594	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	2,01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.805.602	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.041.699	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	918.590	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.249.034	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.608.339	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.385.770	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	2,01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.940.560	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.196.466.582	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.168.329.955	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.357.427	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.779.200	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.782.732	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.782.732	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.354.075	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.354.075	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.000	1	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.050.432	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.884.383	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.865.809	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	2,06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.376.240	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.924.000	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.00 00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.847.262	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7 1	7.01.0.00.0.00.02.0000	1	2,07	5 Pengadaan Mebel	10.170.832	
7 01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.243.250	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.994.980	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.994.980	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.717.390	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.147.390	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.145.886	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.439.266	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.439.266	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.933.026	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.933.026	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.000	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	76.773.594	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	23.610.110	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	53.163.484	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.983.118	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.983.118	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.983.118	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.945.651	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.945.651	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.421.445	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.524.206	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	399.417.449	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	399.417.449	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	365.093.767	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	9.398.682	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.965.273	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.965.273	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.016.264	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.721.820	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.036.010	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.191.179	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0001		Kelurahan Jontlak	1.253.366.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.253.366.100	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0001	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.253.366.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.795.964	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	266.057.992	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0001	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	966.060.535	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0001	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	10.451.609	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0002		Kelurahan Sasake	1.157.896.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.157.896.200	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0002	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.157.896.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.019.277	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	506.297.139	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0002	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	613.223.806	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0002	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	27.355.978	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0003		Kelurahan Gerantung	1.152.166.800	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0003	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.152.166.800	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0003	3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.152.166.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.672.973	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	371.881.633	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0003	03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	761.202.079	
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0003	3 2,02 4	Evaluasi Kelurahan	12.410.115	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kantor Camat Praya Barat	3.056.771.012	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.496.545.328	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.273.900	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.930.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.145.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	522.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.045.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.272.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.664.500	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.694.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.836.253.692	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.762.892	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.458.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.032.800	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.556.691	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.085.636	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.265.055	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.206.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.027.780	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	291.433.180	
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	1 2.07 5	Pengadaan Mebel	2.594.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.141.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.141.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.291.865	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.727.488	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.564.377	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.020.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.240.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.240.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.780.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65.780.000	

Piaton Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.532.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.532.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.532.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	387.368.684			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	387.368.684		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	387.368.684	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.305.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.305.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.168.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.225.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000		06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.912.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000			Kantor Camat Praya Barat Daya	2.334.739.832			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.794.824.596			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.239.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.290.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.290.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.203.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	7.203.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.363.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.290.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000		1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.564.302.365		
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000		1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.555.669.365	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.483.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.150.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.668.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.668.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.175.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.175.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.131.781	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.579.580	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.811.971	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.785.230	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.455.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.118.940	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,07 5	Pengadaan Mebel	10.118.940	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.246.090	
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.158.340	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.087.750	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.942.620	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.693.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.248.720	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	107.715.016	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.087.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.087.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12.932.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12.932.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	79.695.516	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	21.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58.695.516	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.048.772			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.048.772		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.048.772	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.000.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	322.370.448			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	322.370.448		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.832.250	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	254.148.198	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.390.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.781.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.781.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.781.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000		06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.500.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000			Kantor Camat Praya Timur	3.260.972.262			
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.691.995.363			
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.728.881		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.725.735	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.278.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.228.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	947.894	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.849.252	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.040.578.847	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.027.295.293	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.006.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.277.554	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.968.955	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.308.592	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.847.863	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.316.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.496.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.466.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.386.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.819.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.829.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.989.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.034.120	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.034.120	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	93.034.120	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.237.582	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.237.582	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.237.582	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.825.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.825.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.825.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	378.880.197	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	378.880.197	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	378.880.197	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.000.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kantor Camat Pujut	2.786.826.815	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.243.189.533	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.953.851	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.854.452	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.696.191	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.161.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.481.592	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.113.516	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.581.800	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.064.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.819.702.453	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.749.983.691	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.790.762	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.928.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.866.475	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.174.766	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.685.709	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.720.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.286.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.650.097	
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	1 2,07 5	Pengadaan Mebel	26.650.097	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.186.625	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.186.625	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.830.032	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.867.620	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.962.412	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.084.430	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.915.045	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.015.365	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.899.680	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.169.385	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.169.385	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.284.390	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.284.390	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.284.390	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.303.254	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	53.303.254	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.303.254	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	359.708.087	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	359.708.087	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	359.708.087	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34.257.121	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.257.121	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.535.301	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.650.261	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.071.559	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kantor Camat Kopang	2.869.964.293	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.238.408.569	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.133.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.201.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.191.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.191.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.191.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.191.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.205.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.771.174.901	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.762.054.205	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.310.696	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.810.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.000	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.561.865	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.210.520	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.503.361	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.956.692	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.967.292	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.924.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.980.217	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000		1 2.07 5	Pengadaan Mebel	4.547.037	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.192.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.192.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.366.086	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.558.086	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.808.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.467.065	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	00	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	105.816.240	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000		02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	105.816.240	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket	
1				2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.650.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.650.825	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.884.875	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19.884.875	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.884.875	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72.528.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.528.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72.528.000	
7	1	7.01.0.00.0.00.08.000	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	347.837.829	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	347.837.829	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	347.837.829	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.837.955	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.837.955	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.213.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.624.955	
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000			Kantor Camat Batukliang	2.516.332.174	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.061.726.160	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.294.624	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.506.111	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.788.513	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.535.475.142	
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.230.947	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.307.163	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.937.032	
7	1	7.01.0.00.0.00.09.000	1	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.362.993	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.769.732	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.753.261	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.250.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.590.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331.745.955	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	1 2,07 5	Pengadaan Mebel	80.312.775	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.965.946	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.245.946	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.881.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.956.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.925.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.520.907	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.215.052	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02 2,01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.215.052	
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	2 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.305.855	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02 2,04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.305.855	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.253.827	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.253.827	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03 2,01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.253.827	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.227.809	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04 7,03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.227.809	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	04 7,03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.227.809	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	266.482.045	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	266.482.045	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	05 2,01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	266.482.045	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	54.121.426	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.09.00	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54.121.426	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06 2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	31.196.682	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	06 2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.924.744	
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kantor Camat Batukliang Utara	2.668.057.729	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.228.460.674	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.006.681	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.023.380	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.575.773	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.407.528	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.643.943.029	
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.590.866.006	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.980.345	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.096.678	
7	1	7.01.0.00.0.00.10.000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.072.371	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.719.718	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.304.653	
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.200.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.848.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.053.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.045.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.952.413	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.908.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01 2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.043.813	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.688.957	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.180.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02 2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.180.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket			
1				2	3	4			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	33.508.957	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000		02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	33.508.957	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.419.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.419.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000		03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.419.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.322.880	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.322.880	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000		04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.322.880	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	249.783.318	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	249.783.318	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000		05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	249.783.318	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.382.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	00	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.382.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000		06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50.382.700	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000					Kantor Camat Pringgarata	2.857.420.308	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.269.430.607	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.754.273	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.672.325	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.575.130	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.820.936	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.765.336	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.941.736	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.390.463	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000		1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.588.347	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.668.865.393	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000		1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.623.064.585	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000		01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.526.972	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.273.836	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.681.651	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.756.810	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.596.225	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1 2,06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.022.616	
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.100.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.206.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.676.480	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.243.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.569.032	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.569.032	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.883.778	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.258.778	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.625.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.636.212	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.586.212	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58.586.212	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33.244.360	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.244.360	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.244.360	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.589.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.589.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.589.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	404.250.097	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	404.250.097	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05 2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	404.250.097	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.269.432	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.00	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.269.432	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06 2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.403.916	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06 2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.421.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06 2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.444.516	
7	1	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kantor Camat Jonggat	2.958.978.794	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.439.716.053	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.569.341	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.288.841	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.067.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.718.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.982.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.718.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.795.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.873.813.785	
7	1	7.01.0.00.0.00.12.0000	1 2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.857.234.810	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.795.275	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.783.700	
7	1	7.01.0.00.0.00.12.000	1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.595.979	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.746.070	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.617.909	
7	1	7.01.0.00.0.00.12.0000	1 2,06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.632.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	251.433.180	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.241.000	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.241.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.062.768	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.062.768	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.768.903	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.268.903	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.268.903	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.641.389	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.641.389	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.641.389	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	340.460.249	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	340.460.249	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	340.460.249	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.542.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.542.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.014.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16.528.200	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000		Kantor Camat Janapria	2.763.848.903	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.240.399.239	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.061.065	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.209.842	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.947.494	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.858.094	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.004.794	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.765.847	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.487.900	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000	1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.787.094	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.940.022.171	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.927.814.877	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.707.294	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.500.000	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000	1 2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.911.583	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.257.557	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.880.402	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000	1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.265.624	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.508.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.556.800	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.556.800	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.198.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.198.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.649.620	
7	1	7.01.7.01.0.00.07.0000	1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.517.620	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.132.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.355.244	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.240.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.240.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.500.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.615.244	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.615.244	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.204.948	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.204.948	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.204.948	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	340.675.037	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	340.675.037	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	340.675.037	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.214.435	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.214.435	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.579.200	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.236.235	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.287.000	
7	01	7.01.7.01.0.00.07.0000	06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.112.000	
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.012.231.138	
8	1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.012.231.138	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	8.012.231.138	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.847.049.375	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.595.476	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.695.567	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.301.035	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.087.735	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.051.683	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.164.652	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.294.804	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.447.971.923	
8	1	8.01.0.00.0.00.01.0000	1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.821.087	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.325.499	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.825.337	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1				2	3	4
8 1	8.01.0.00.0.00.01.000	1	2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.385.486	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.304.719	
8 1	8.01.0.00.0.00.01.0000	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.156.767	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.484.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.933.010	
8 1	8.01.0.00.0.00.01.0000	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	28.933.010	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.486.840	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.606.840	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.676.640	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.676.640	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	914.259.324	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	914.259.324	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.016.669	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7.493.524	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	867.173.239	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.740.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.835.892	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.00 00	03		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.780.416.061	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1					2	3	4
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	00	03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.780.416.061	
8	1	8.01.0.00.0.00.01.0000		3 2,01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.954.807	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		03 2.01	02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.908.803	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		03 2.01	03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	928.043.723	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		03 2.01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	839.313.477	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		03 2.01	05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.195.251	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	00	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	98.041.966	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	00	04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	98.041.966	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		04 2.01	01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.149.610	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		04 2.01	02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.234.071	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket		
1				2	3	4		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65.497.265	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.077.155	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.083.865	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	356.815.303	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	356.815.303	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.678.275	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.893.932	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	292.290.010	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48.026.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.927.086	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.015.649.109	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.015.649.109	

Platon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1						2	3	4
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.046.839	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	67.898.987	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	213.337.607	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	208.145.611	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	49.781.772	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.472.438.293	
TOTAL							2.227.635.536.286	